

integrito

UPAYA MENGATUR APARATUR



Edisi Kaleidoskop 2018



Anti-corruption Learning Center

Corruption Eradication Commission of Indonesia

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Pusat Edukasi Antikorupsi
(Anti-corruption Learning Center)
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
Indonesia

Tel. : +62 21 2550 8300
e-mail: informasi@kpk.go.id
Web.: <http://www.aclc.kpk.go.id>



UTAMA 12

UPAYA MENGATUR APARATUR

DATA MENUNJUKKAN ADA LEBIH DARI SERIBU APARATUR SIPIL NEGARA YANG SEHARUSNYA DIBERHENTIKAN KARENA TERLIBAT KASUS PIDANA. KEPUTUSANNYA SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. NAMUN UANG NEGARA MASIH MENGALIR KE REKENING MEREKA SEBAGAI GAJI. LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT, TERMASUK KPK, BERKOORDINASI UNTUK MENGATUR APARATUR NEGARA YANG BERMASALAH.

6

JEJAK KASUS

KAU KU KEJAR, KAU KU TANGKAP

10

KANAL KPK

SAMPAI DUNIA KIAMAT

22

JEJAK KASUS

KORUPSI SDA RUGIKAN NEGERI

24

CAKRAWALA

DAPHNE CARUANA GALIZIA

28

KHUSUS

CIPTAKAN LABORATORIUM PEMUDA DESA

36

CENDEKIA

PESAN KESETARAAN DALAM KESENIAN

39

MOZAIK

MINIATUR BUDAYA INDONESIA DI CINTAKARYA

42

KALEIDOSKOP

KINERJA KPK SEPANJANG TAHUN 2018

74

FOXPOP

PENDAPAT PUBLIK TENTANG KPK

76

TERAS K-4

PESAN DARI PARA PIMPINAN KPK

ILUSTRASI COVER

Permainan puzzle bergambar orang dengan seragam PNS
Grafis: INTEGRITO/MMS

PERWAKILAN KPK

Pertanyaan : Lemah Ngogo

Yang terhormat kpk, saya mau tanya untuk perwakilan kpk di kabupaten kendal ada apa gak....??
Kalau ada saya bisa menghubungi siapa,

Jawaban:

Sdr.Lemah,
KPK tidak ada perwakilan di daerah, hanya terpusat di Jakarta saja, jika ada yang ditanyakan terkait informasi, konfirmasi, Pengaduan dan Pelaporan LHKPN dapat menghubungi Contact Center KPK di nomor 198, Terimakasih.

BUKU SERIAL KPK

Pertanyaan : Azwar Abdullah

Assalamu 'alaikum
Kami dari komunitas baca, salah satu pegiat anti korupsi di Makassar Kami meminta bantuan dari Pimpinan KPK untuk memberikan buku seri KPK untuk kami bagikan di beberapa sekolah di Makassar sekaligus untuk penanaman nilai korupsi Lokasi pengirimannya ke Jln. Bonto Duri IV No. 11

Terima Kasih
Salam aksi Jujur & Hebat

Jawaban:

Sdr. Azwar,
Mohon untuk mengirimkan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLK) KPK melalui email ini. Terima kasih.

integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Yuyuk Adriati; **Redaktur Pelaksana:** Tri Artining Putri; **Redaktur:** Ipi Maryati; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Siti Sharatassyah. **Kontributor:** Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Galuh Ayu Puspita, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout:** MM.Setiawan; **Grafis & Foto:** Iman Santoso, Indra Gunawan; **Pengolahan Data:** Ashani Saroso, Sicilia Julianty Hutabarat; **Fotografer:** Dian H Baay, Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; **Sirkulasi:** Venny Irliani Amanah. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** integrito@kpk.go.id; **Website:** www.kpk.go.id; **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK_RI; **Instagram:** @official.kpk; **Whatsapp:** 0811199700



@Ritaanggara72g1

Pagi jg,,hrs lah basmi korup2 yg merajalela

@Dedek_Anas

Siap ...Berantas lah korupsi dengan berani, jangan pandang bulu

@Efendi1234

Saya bangga dengan KPK..terus berjuanglah untuk Brantas korupsi

@SupriAd02081028

Mantap... Cegah korupsi mulai darisendiri selalu tertanam

@ricki_fauzi1

smoga slalu sehat slalu dalam lindungan Allah

@sardiwansah1

Siap..... Hidup kpk.... Kami mengandalkan kau

@putucahya76

saya dukung kpk.. Korupsi hanya bisa d berantas dgn memberlakukan hukuman mati pada para kopruptor

@CINTAI_NKRI

Tetap kokoh bagai baja KPK

@la_manggila

Siaaaaap. Rakyat siap dukung!

@ronaldoaldo197

semangat untuk KPK. tegakkan keadilan seadil-adilnya ya

DESAKU YANG KUCINTA

Kembali ke desa. Proklamator bangsa ini: Mohammad Hatta, sudah meng-gagasnya sebelum kemerdekaan. Tepatnya tahun 1935-1941. Ia menulis banyak soal pembangunan desa dalam sebuah buku "Beberapa Fasal Ekonomi". Bung Hatta menyebut kemunculan kota di Indonesia bukan dari proses kemajuan masyarakat. Kota muncul akibat tindakan ekonomi dari luar, yakni kolonialisme Belanda. Kondisi ini membuat kota di Indonesia sangat terbuka dengan pengaruh dari luar. Bahkan jadi pengekor. Sehingga perbedaan antara desa dan kota pun sangat timpang. Padahal masa itu, sekitar 80 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Ketimpangan ini membuat desa seolah hanya menjadi penyedia kebutuhan kota.

Pada peran dan potensi desa sangat bisa jauh lebih berkembang daripada itu. Apalagi jumlah desa di Indonesia mencapai 74.910. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada jumlah kota yang hanya 514. Bisa dibayangkan potensi desa dan penduduknya yang bisa dikembangkan untuk Indonesia.

Sejak 2015, gagasan Bung Hatta terekomodasi. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk desa sebesar Rp 20,7 triliun. Tahun 2016 alokasi anggaran negara untuk dana desa mencapai Rp 46,98 triliun. Dari jumlah ini, rata-rata desa mendapatkan alo-

kasi dana sebesar Rp 628,49 juta. Hingga tahun 2018, dana desa terus meningkat hingga Rp 60 triliun.

Dalam beleid yang mengaturnya, disebutkan salah satu fungsi dana desa adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan ekonomi, dukungan pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain.

Fungsi peningkatan partisipasi masyarakat ini sangat menarik untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Soalnya, partisipasi masyarakat akan sangat dekat dengan fungsi pengawasan dan transparansi anggaran. Jumlah dana desa yang besar, penggunaannya harus terawasi dengan baik dan melibatkan masyarakat.

Terutama pemudanya.

Soalnya, jumlah pemuda di desa sekarang ini lebih banyak. Mereka juga dianggap lebih kritis dalam menyikapi isu pembangunan desa ketimbang para tua yang kebanyakan sudah menjadi perangkat desa.

Pemuda berkepentingan karena seharusnya memang mereka yang merasakan manfaat dana desa. Mereka harus tahu bahwa dana desa bisa dimanfaatkan untuk memajukan desa dengan segala kegiatan dan ide segarnya. Dengan begitu, anggaran terawasi, programnya terlakoni●



o r a n g

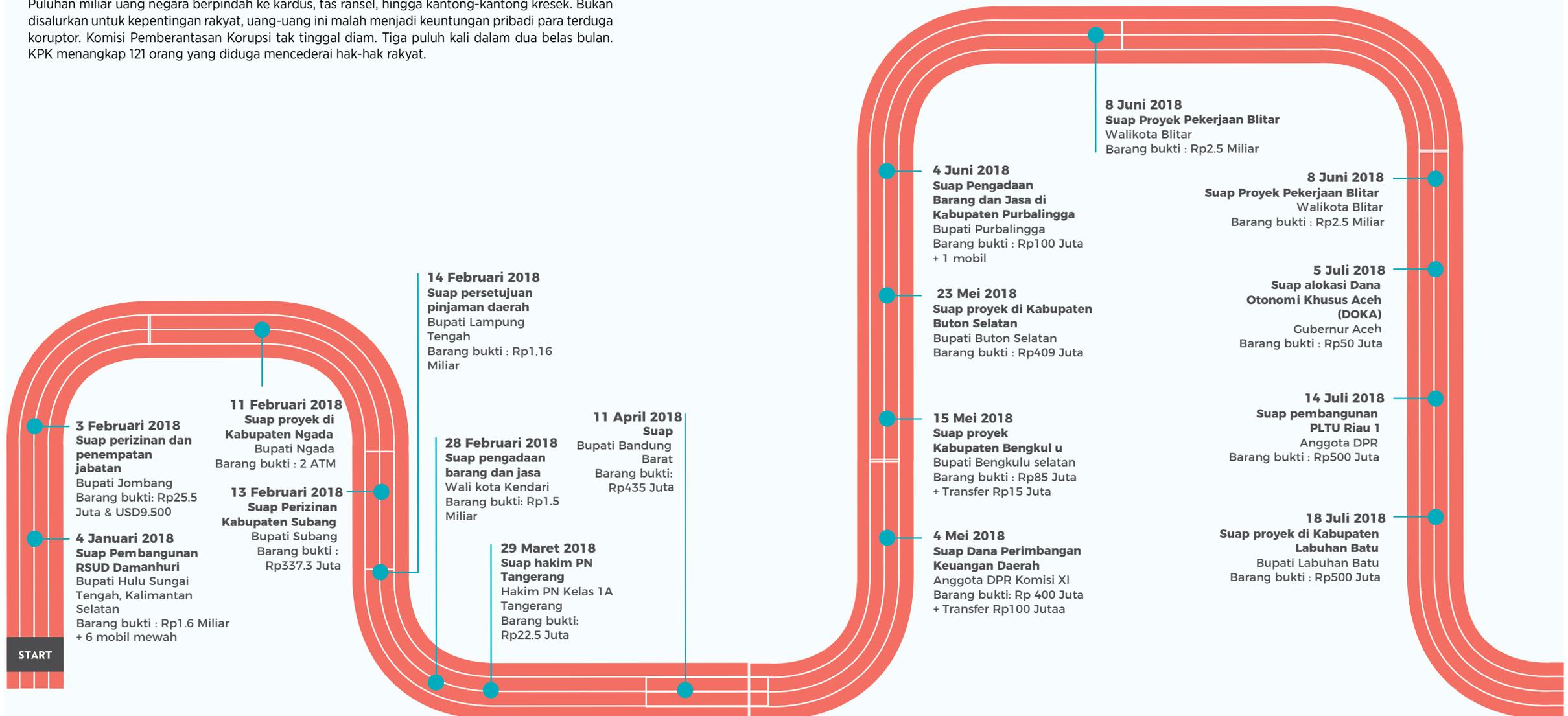
FESTIVAL LAGU #SAKSI2018

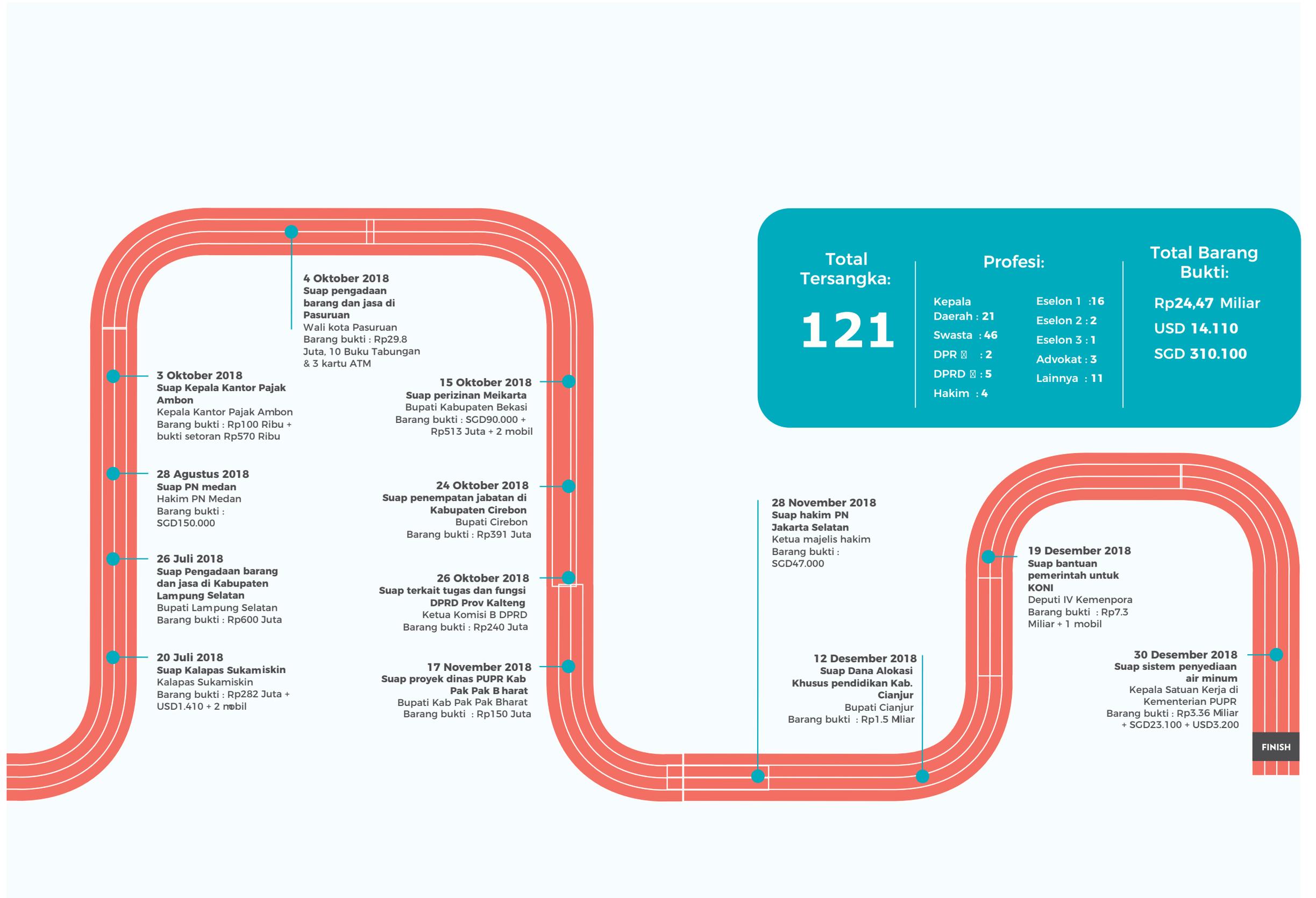


Kolaborasi - Navicula dan Endah berkolaborasi dalam Konser Festival Lagu Suara Antikorupsi 2018 di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/11).

KAU KU KEJAR, KAU KU TANGKAP

Puluhan miliar uang negara berpindah ke kardus, tas ransel, hingga kantong-kantong kresek. Bukan disalurkan untuk kepentingan rakyat, uang-uang ini malah menjadi keuntungan pribadi para terduga koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi tak tinggal diam. Tiga puluh kali dalam dua belas bulan, KPK menangkap 121 orang yang diduga mencederai hak-hak rakyat.





3 Oktober 2018
Suap Kepala Kantor Pajak Ambon
 Kepala Kantor Pajak Ambon
 Barang bukti : Rp100 Ribu + bukti setoran Rp570 Ribu

28 Agustus 2018
Suap PN medan
 Hakim PN Medan
 Barang bukti : SGD150.000

26 Juli 2018
Suap Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan
 Bupati Lampung Selatan
 Barang bukti : Rp600 Juta

20 Juli 2018
Suap Kalapas Sukamiskin
 Kalapas Sukamiskin
 Barang bukti : Rp282 Juta + USD1.410 + 2 mobil

4 Oktober 2018
Suap pengadaan barang dan jasa di Pasuruan
 Wali kota Pasuruan
 Barang bukti : Rp29.8 Juta, 10 Buku Tabungan & 3 kartu ATM

15 Oktober 2018
Suap perizinan Meikarta
 Bupati Kabupaten Bekasi
 Barang bukti : SGD90.000 + Rp513 Juta + 2 mobil

24 Oktober 2018
Suap penempatan jabatan di Kabupaten Cirebon
 Bupati Cirebon
 Barang bukti : Rp391 Juta

26 Oktober 2018
Suap terkait tugas dan fungsi DPRD Prov Kalteng
 Ketua Komisi B DPRD
 Barang bukti : Rp240 Juta

17 November 2018
Suap proyek dinas PUPR Kab Pak Pak B harat
 Bupati Kab Pak Pak Bharat
 Barang bukti : Rp150 Juta

Total Tersangka:
121

Profesi:

Kepala Daerah : 21	Eselon 1 : 16
Swasta : 46	Eselon 2 : 2
DPRD : 2	Eselon 3 : 1
DPRD : 5	Advokat : 3
Hakim : 4	Lainnya : 11

Total Barang Bukti:
 Rp24,47 Miliar
 USD 14.110
 SGD 310.100

28 November 2018
Suap hakim PN Jakarta Selatan
 Ketua majelis hakim
 Barang bukti : SGD47.000

12 Desember 2018
Suap Dana Alokasi Khusus pendidikan Kab. Cianjur
 Bupati Cianjur
 Barang bukti : Rp1.5 Miliar

19 Desember 2018
Suap bantuan pemerintah untuk KONI
 Deputi IV Kemenpora
 Barang bukti : Rp7.3 Miliar + 1 mobil

30 Desember 2018
Suap sistem penyediaan air minum
 Kepala Satuan Kerja di Kementerian PUPR
 Barang bukti : Rp3.36 Miliar + SGD23.100 + USD3.200

FINISH

KONSER FESTIVAL LAGU SAKSI 2018

Sampai Dunia Kiamat...

Irama, nada, lirik, dan keharmonisan suara yang tercipta dari sebuah karya musik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Musik yang sering disebut bahasa universal membuat semua orang mudah menerima pesan yang tersirat dalam melodi. Karena itulah karya musik menjadi sebuah alat komunikasi yang kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia.

Semua alasan ini membuat KanalKPK memilih musik sebagai salah satu medium untuk menyebarkan pesan antikorupsi ke penjuru negeri. Lewat musik, semangat antikorupsi dapat diterima dengan menyenangkan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo mengatakan musik adalah salah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan KPK untuk membuat setiap masyarakat sadar bahaya korupsi.

“Rakyat Indonesia harus paham dan mengamalkan nilai antikorupsi, terutama anak muda,” kata Agus dalam konser Festival Suara Antikorupsi (SAKSI) 2018 di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/11).

Dalam konser Festival Suara Antikorupsi (SAKSI) 2018 KPK meluncurkan sebuah album kompilasi, yang berisi sepuluh lagu terbaik tentang antikorupsi. Album ini diluncurkan oleh

Ketua KPK Agus Rahadjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif.

Sembilan lagu dalam album tersebut merupakan

karya terbaik yang berhasil menjadi finalis dalam Festival SAKSI 2018. Generasi Antikorupsi dari Den'Orens menjadi lagu pembuka dalam album ini, berturut-turut dilanjutkan dengan Dang Ding Dong dari Tiga Warna Musik, Anti Korupsi dari akar, Tak Hanya Diam dari Onezero dan Dimana Nurani dari DNA Band.

Selain itu, lagu Suap.. Cuap.. Nguap.. dari Inoe Band juga berhasil terpilih masuk ke dalam album kompilasi bersama dengan lagu Terbilang Berapa, Tertulis Berapa dari Meriam, Bebas Dari Korupsi dari Alma Band, dan lagu Hentikan Korupsi dari Novice.

Band asal Bali, Navicula turut mempersembahkan sebuah karya terbaik sebagai lagu ke sepuluh dalam album ini. Lagu Biarlah Malaikat merupakan sebuah lagu yang terinspirasi dari tragedi penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan yang hingga kini belum diketahui pelakunya.

Sore itu, konser dimulai dengan penampilan dari sembilan finalis yang lolos. Para finalis harus menyanyikan karya mereka secara langsung di hadapan para juri, yaitu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, vokalis band Navicula Gede Robi, dan vokalis band Cupumanik, Che.

Setelah itu, alumni Festival LaguSAKSI 2017 Kawan Lama membawakan beberapa lagu andalan mereka termasuk lagu yang berhasil meraih predikat juara dua di regional kota Bandung, Suara Antikorupsi.

Usai menikmati alunan lagu bersemangat

dari Kawan Lama, penonton kembali dikobarkan semangatnya lewat penampilan dari Navicula. Band psychedelic-grunge ini juga menyanyikan lagu Biarlah Malaikat secara langsung dihadapan ratusan penonton yang datang.

Momen peluncuran album ini dimanfaatkan Robi Navicula untuk mengajak seluruh penonton berdoa agar pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan segera tertangkap.

“Hari ini, mari kita berdoa agar kasus Novel Baswedan segera tuntas, dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Robi setelah menyanyikan lagu Biarlah Malaikat di atas panggung.

Febri, Neida, Ilham, dan Ezra dari Hivi! tidak kalah semangat dari bintang tamu sebelumnya. Band yang sedang naik daun ini mengajak generasi muda yang datang untuk aktif menyebarkan semangat antikorupsi. Interaksi yang seru antara Hivi! dan penonton dalam konser malam itu benar-benar menghadirkan semangat antikorupsi di tengah penonton.

Selain menikmati lagu, penonton juga disuguhkan dengan stand-up comedy yang dibawakan oleh Heri Hore. Konser Festival SAKSI 2018 ditutup dengan apik dengan penampilan band asal Bandung, Cupumanik. Che dan kawan-kawan berhasil membakar panggung dengan lagu-lagu yang berisi pesan-pesan sosial.

Konser Festival Lagu SAKSI 2018 juga menjadi malam yang menentukan untuk mengetahui siapakah juara dari sembilan finalis yang berhasil ke Jakarta. Lagu Antikorupsi berhasil membawa Akar menjadi juara pertama Festival Suara Antikorupsi 2018. Band asal kota Medan itu mengaku bahwa lagu tersebut merupakan ungkapan keresahan dan rasa kesal melihat korupsi yang semakin merajalela.

“Apalagi kota Medan, seperti yang kita tau Medan sebagai kota terkorup di Indonesia. Itu

membuat kita kesal dan resah,” ujar sang vokalis Akar, Felix dalam sebuah wawancara di Bincang KanalKPK.

Selain Akar, Tiga Warna Musik yang berasal dari Surabaya berhasil menjadi runner up yang disusul oleh band asal kota Yogyakarta Meriam yang berhasil menjadi juara ketiga.

Tibga besar, ada juara favorit yang dimenangkan oleh Inoe Band. Band asal Tangerang Banten ini berhasil mendapatkan voting terbanyak dari masyarakat Indonesia yang sudah memilih di situs kanal.kpk.go.id.

Tahun ini, Kanal KPK mengemas berbeda Festival Lagu SAKSI. Mulai dengan melakukan roadshow Klinik Musik Antikorupsi ke beberapa kota yaitu Bandung, Yogyakarta, Bali, Makassar, Medan, Balikpapan, Cirebon, dan Surabaya.

Tugas dewan juri kali ini juga semakin berat. Juri harus memilih sembilan karya terbaik dari 220 karya anak bangsa yang dikirim ke Gedung Merah Putih KPK. Melihat besarnya antusias generasi muda yang mengirimkan karya ke KPK, membuat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yakin bahwa gerakan ini harus diteruskan hingga kapanpun. KPK harus bisa merangsang kreativitas anak muda untuk menyuarakan antikorupsi lewat musik.

“Festival SAKSI akan dilaksanakan sampai dunia ini kiamat. Artinya, kita akan terus bernyanyi untuk menyuarakan antikorupsi,” tutup Saut.



SEPERTI APA SERUNYA KONSER FESTIVAL SUARA ANTIKORUPSI 2018 ? SIMAK KESERUANNYA DI KANAL.KPK.GO.ID

UTAMA

UPAYA MENGATUR APARATUR

DATA MENUNJUKKAN ADA LEBIH DARI SERIBU APARATUR SIPIL NEGARA YANG SEHARUSNYA DIBERHENTIKAN KARENA TERLIBAT KASUS PIDANA. KEPUTUSANNYA SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. NAMUN UANG NEGARA MASIH MENGALIR KE REKENING MEREKA SEBAGAI GAJI. LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT, TERMASUK KPK, BERKOORDINASI UNTUK MENGATUR APARATUR NEGARA YANG BERMASALAH.

Sejak tiga tahun lalu Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memiliki data tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bermasalah. Asalnya dari aduan masyarakat dan instansi terkait, ditambah hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015. Merasa masih terbatas, BKN kemudian berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang memiliki data serupa untuk diverifikasi.

Hasilnya, pada 2016, BKN menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ke-

menterian ini memiliki data warga binaan lembaga permasyarakatan baik yang sudah keluar maupun yang masih menjalani hukuman.

Rintangan belum selesai. Meski data sudah di tangan, BKN masih mengalami kesulitan untuk memverifikasi dan memvalidasinya. Sehingga BKN harus mencari beberapa data tambahan yang dapat memudahkan BKN mencari Nomor Induk Pegawai (NIP) yang bersangkutan.

“Di data kasusnya, tidak ada NIP ASN yang bermasalah, padahal itu Informasi yang paling spesifik yang mempermudah pelacakan,” kata Deputy Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Badan Kepegawaian Nasional, I Nyoman Arsa saat dihubungi integrito medio Oktober 2018.

Setelah datanya cukup, langkah BKN selanjutnya adalah menginformasikan kepada seluruh kementerian, lembaga negara, dan seluruh pemerintah daerah daftar nama ASN yang bermasalah. Gunanya untuk segera diambil tindakan menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai ASN.

Aduan dan laporan tentang ASN bermasalah tidak hanya diterima oleh BKN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga menerimanya. Komisioner Bidang Penyelidikan dan



Pegawai Negeri – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bercengkrama setelah mengikuti apel di kantor Walikota Purbalingga.

Pengaduan KASN, Sumardi, mengatakan secara presentase, aduan terkait ASN bermasalah memang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pelanggaran kode etik dan rekrutmen bermasalah. Namun setelah ditelaah dan dianalisis aduan-aduan tersebut benar dan terverifikasi.

“Sedikit bukan berarti tidak kami tindak lanjut,” kata Sumardi kepada integritas, Kamis, 11 Oktober 2018.

Justru dari yang sedikit ini, KASN malah menemukan ASN bermasalah ini merupakan fenomena gunung es yang akan berbahaya jika diabaikan. Sumardi mengatakan, saat melakukan telaah, analisis dan verifikasi aduan-aduan, fenomena ini menjadi temuan KASN.

Dalam melakukan tiga proses tersebut, kata Sumardi, KASN selalu berusaha melakukan pemenuhan cover both side supaya semua merasa diperlakukan dengan adil. Setelah menerima dokumen aduan yang dianggap cukup sah untuk diproses, KASN kemudian mengklarifikasinya dengan memanggil pihak-pihak terkait. Mulai dari kepala daerah hingga kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Hasil simpulan sementara kemudian dirapatkan bersama dengan jajaran pimpinan KASN. Jika terbukti benar dan melanggar aturan, rapat pimpinan tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang kemudian dikirimkan ke kepala daerah atau pimpinan instansi terkait.

“Sesungguhnya ini sekadar administrasi kepegawaian, tidak rumit,” kata Sumardi.

Sayangnya, praktiknya tidak sederhana

itu. Rekomendasi KASN seringkali tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah atau instansi terkait. Alasannya beragam. Pertama, ASN bermasalah tidak segera diberhentikan karena ada kedekatan hubungan dengan kepala daerah. Sehingga ada konflik kepentingan, kepala daerah merasa tidak enak jika harus memberhentikan ASN yang merupakan lingkaran terdekatnya.

Masalah selanjutnya adalah ASN yang terkena hukuman pidana, dianggap bukan pelaku utama. Sedangkan pelaku utamanya masih bebas dan menjabat sebagai ASN.

“Saat kami klarifikasi, teman-teman di daerah bilang sebenarnya mereka enggak terima uang, hanya ikut tanda tangan,” kata Sumardi.

Terakhir adalah masalah politik. Saat proses mendapatkan jabatan, kepala daerah tentu perlu biaya. Sehingga harus meminta bantuan ke sana sini. Orang-orang yang membantu kepala daerah tersebut kemudian mendapatkan jabatan dengan proses yang tidak semestinya.

“Jadi di luar ASN bermasalah, ada sistem yang lebih besar yang harus dibenahi,” kata Sumardi.

Bukan hanya BKN dan KASN yang menjadi tempat masyarakat mengadu soal ASN bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerima aduan serupa. Paralel dengan aduan-aduan yang berdatangan, dari sisi penindakan ada beberapa kasus yang ternyata terkait dengan jual beli jabatan. Hal ini sejalan dengan salah satu program Unit Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK: manajemen ASN.

KPK kemudian menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengadakan koordinasi dengan BKN dan KASN. Bentuknya adalah pertemuan Deputi Bidang Pencegahan KPK dengan Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN pada 4 Desember 2017. Selain itu, ada pula pertemuan Pimpinan KPK dengan Ketua KASN pada 1 Februari 2018. Serta pertemuan tingkat teknis tiga lembaga pada 8 Februari 2018.

Hasilnya, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian bersama terkait dengan manajemen ASN. Pertama, pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalam dalam kasus tindak pidana korupsi. Kedua, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan yang terindikasi suap atau pungutan liar.

Langkah ini sesuai dengan yang diatur dalam beleid tiga puluh delapan tahun lalu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, di pasal 23 mengatur Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Aturan ini konsisten disebutkan dengan aturan turunannya dan aturan-aturan yang baru. Sebut saja Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Undang Undang Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014, dan yang terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Semua aturan tersebut konsisten menyebutkan ASN yang sudah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harus diberhentikan tidak dengan hormat. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan dalam amar putusan pengadilan memang tidak disebutkan pemberhentian ASN. Putusan hanya menyebutkan hukuman kurungan.

“Soal pemberhentian ini harus tetap dilaksanakan karena tercantum dalam undang-undang,” kata Agus.

Setelah melalui verifikasi dan validasi antarlembaga, ditemukan 2.357 ASN di tingkat pusat dan daerah yang telah dinyatakan bersalah karena terlibat masalah hukum.

“Soal pemberhentian ini harus tetap dilaksanakan karena tercantum dalam undang-undang,”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK

BKN kemudian menindaklanjutinya dengan berkirim surat ke seluruh instansi terkait di pusat dan daerah untuk segera melaksanakan amanat undang-undang. Para ASN bermasalah ini dianggap berpotensi menimbulkan kerugian negara. Soalnya, mereka tetap digaji dan belum diberhentikan.

Seluruh instansi terkait diminta segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Termasuk ke Kementerian Dalam Negeri. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengatakan kementeriaannya bertindak sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga tidak lagi punya kewenangan langsung atas data dan penindakan terhadap ASN daerah.

Sri mengatakan informasi soal ASN bermasalah memang ia terima dari BKN yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan dan teknis terkait ASN di seluruh Indonesia. Kemendagri, kata dia, kemudian melakukan koordinasi terkait dengan data, jumlah, sebaran data, aturan, dan sanksi tentang ASN.

“Kami juga menginisiasi meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung, karena kasus ini sudah berlangsung lama dan baru sekarang akan diberikan sanksinya,” kata Sri.

Ahli Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti mengatakan, kondisi ini memang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara, kata dia, timbul karena negara tetap menggaji 2.357 ASN yang tidak melakukan tugas dan fungsinya.

“Seharusnya kalau tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, ya tidak bisa diberi kompensasi dong,” kata Bivitri●

CARI SOLUSI SETELAH EVALUASI



Saat ini ada sekitar empat juta tiga ratus ribu orang yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Data jutaan orang tersebut tak terintegrasi dengan baik di lembaga-lembaga negara terkait yang bertugas mengurus ASN. Kondisi data ini yang menjadi salah satu sebab butuh waktu cukup lama untuk menertibkan ASN yang bermasalah, yang seharusnya

sudah diberhentikan. Tahun 2015, data ASN diperbarui melalui Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau lebih dikenal dengan e-PUPNS.

Data ASN bermasalah, hanya diperoleh dari laporan Kementerian, pengaduan, pemberitaan media massa dan pembahasan di media sosial. Jumlah data dari sumber-sumber ini sangat terbatas dan tidak sinkron de-

ngan hasil pendataan tahun 2015.

Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, data ASN bermasalah sulit diperoleh karena putusan yang sifatnya berkekuatan hukum tetap, tidak disampaikan ke instansinya.

“Karena memang tidak ada kewajiban seperti itu,” kata dia kepada integritas medio Oktober 2018.

Menurut aturan yang ada, lanjut Bambang, putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya wajib diserahkan kepada terpidana dan Kejaksaan. Sehingga, kata dia, terpidana yang merupakan ASN, lebih mungkin akan menyembunyikan putusan tersebut supaya tidak diberhentikan.

Di sisi lain, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi-instansi terkait, tidak proaktif. Padahal, sejak awal ASN tersebut diproses hukum, PPK mengetahuinya. Ditambah lagi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga tidak menghimpun data ASN yang sedang diproses hukum.

“Jika PPK dan BKD proaktif terhadap proses hukum ASN ini, mereka bisa memberikan masukan ke kepala daerah soal pemberhentian sesuai aturan yang ada,” kata Bambang.

Soalnya, ketika PPK dan BKD tidak memberi masukan, para kepala daerah tidak akan

mengetahuinya. Urusan data ASN, kata Bambang, terlalu teknis untuk diketahui langsung oleh kepala daerah.

Manajemen Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinator Supervisi Pencegahan. KPK menerima banyak informasi dan aduan masyarakat tentang ASN bermasalah. Namun belum secara rinci. Sehingga KPK tidak bisa langsung menindaklanjutinya. Pada saat bersamaan, banyak terjadi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan. Kondisi ini membuat KPK merasa tata kelola manajemen ASN harus segera dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait.

Ada dugaan ASN bermasalah yang belum diberhentikan, menimbulkan kerugian negara. Belum ada hitungan pasti soal kerugian negara yang ditimbulkan akibat lamanya pemberhentian ASN bermasalah. Namun yang sudah pasti adalah gaji dan pensiun yang terus dibayarkan pemerintah. Padahal 2.357 ASN tersebut sudah tidak berhak atas gaji dan pensiun tersebut.

“Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian administratif dan pelanggaran undang-undang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengatakan keru-



Upacara – Ilustrasi kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mengikuti upacara bendera.



Berdoa – Ilustrasi Pegawai Negeri (PNS) sedang berdoa dalam sebuah upacara.

gian negara baru bisa dihitung jika gaji dan pensiun tetap dibayarkan sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN. Selama belum ada SK tersebut, maka gaji dan pensiunnya bisa tetap dibayar.

“Ini sesuai dengan fatwa hukum Mahkamah Agung,” kata Sri.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan kerugian negara bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama adalah dilihat dari aspek hukum. Jika hanya dilihat dari aspek ini, kata dia, harus mencari konsep kerugian negara yang ada di aturan Kementerian Keuangan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Bisa enggak nyangkut kalau di kasus seperti ini,” kata Bivitri.

Namun bukan berarti ASN bermasalah yang tidak diberhentikan, tidak menimbulkan kerugian negara. Seorang ASN, kata Bivitri, harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan kompensasi berupa gaji. Jika sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap, maka jelas tugas dan fungsinya tidak dijalankan dengan benar.

“Tapi terus diberi kompensasi, ini yang jelas menimbulkan kerugian negara,” kata dia.

Sayangnya, lanjut dia, sistem di Indonesia belum bisa mengakomodasi kondisi-kondisi seperti ini. Sehingga penetapan kerugian negara menjadi rumit.

“Karena dengan logika seperti ini, maka tidak bisa menyalahkan ASN saja,” kata Bivitri.

Bivitri mengatakan solusi tercepat untuk memperbaiki manajemen ASN adalah inte-

grasi data seluruh lembaga terkait. Semua data, kata dia, harus terekam secara digital.

“Sehingga verifikasi dan validasi bisa dilakukan dengan cepat, tidak manual,” kata dia.

Soalnya, kata dia, jika menunggu perbaikan sistem dan undang-undang, pasti akan sangat lama.

Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pengaduan Komisi Aparatur Sipil Negara, Sumardi, mengatakan masalah yang terjadi tentang ASN bermasalah ini harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Setidaknya, kata dia, ada empat hal yang harus diperbaiki dalam masalah ini.

Pertama adalah masalah politik. Kepala daerah adalah jabatan politik yang berganti setiap lima tahun. Sistem yang ada saat ini, membuat kepala daerah yang menjabat tidak akan begitu peduli terkait dengan data ASN yang ada di bawahnya. Ditambah lagi, kepala daerah cenderung membuat keputusan yang populis.

Artinya, jika ada yang harus diberhentikan, kepala daerah bisa saja mengambil keputusan sebaliknya demi perolehan dukungan.

Kedua adalah sistem rekrutmen ASN yang harus dilakukan secara terbuka dan tidak nepotisme. Selanjutnya adalah manajemen ASN yang harus terus terjaga mulai dari penempatan setelah rekrutmen, promosi, mutasi, dan demosi.

Terakhir adalah harus ada meritokrasi, yakni memberi penghargaan kepada ASN sesuai dengan keahlian, jabatan, dan prestasinya.

“Masalah politik yang seringkali paling berpengaruh, maka manajemennya harus kuat, supaya siapapun yang menjadi kepala daerah, sistemnya bisa tetap berjalan,” kata Sumardi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), I Nyoman Arsa, mengatakan pihaknya akan melanjutkan kerja sama dan permintaan data ASN bermasalah yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, BKN akan melakukan verifikasi dan validasi.

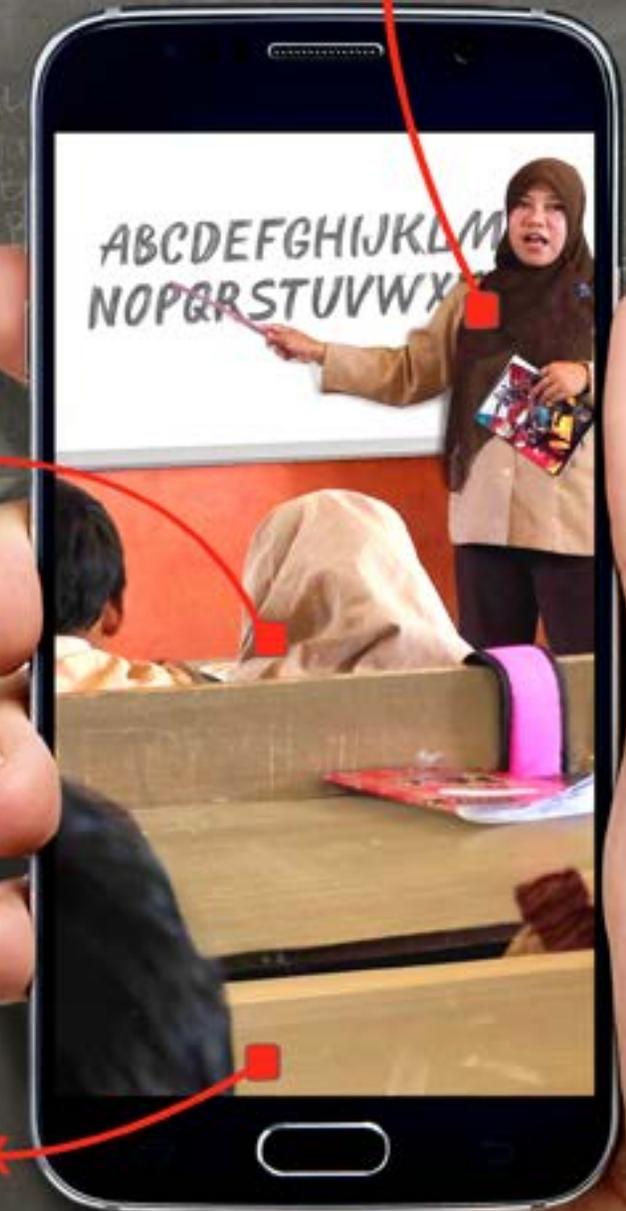
“Setelah itu kami akan menginformasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi pusat dan daerah untuk segera diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Nyoman.

Selain itu, BKN akan memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mendorong penjatihan sanksi kepada ASN bermasalah.



Cegah Korupsi
dari Ujung Jari

BU MARDIJEH
GURU BAHASA INDONESIA



AKHIRNYA BISA
MELANJUTKAN
SEKOLAH
DENGAN
BANTUAN
PIP

MEJA DAN KURSI
KINCLONG LAGI
DENGAN DANA BOS

KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,
SUTOPO PURWO NUGROHO

“JANGAN BESAR KARENA JABATAN.”



Hanya ingin membahagiakan orang tuanya, Sutopo kecil sangat tekun belajar. Ia juga rajin membantu ibunya menyapu halaman. Dua kebiasaan inilah yang akhirnya membawa Sutopo Purwo Nugroho menjadi Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di manapun ia berada, tekun adalah salah satu modal utama. Meski saat ini kangker paru-paru stadium 4B terus menemani hari-harinya, Sutopo menjalani pekerjaannya senormal mungkin.

Ketika menerima integrigo di kantornya, plester masih menempel di tangan kanannya. Ia baru saja menjalani *CT scan* untuk keperluan pengobatannya. Dengan senyum hangatnya yang khas, Sutopo meladeni integrigo untuk wawancara sekitar tiga jam medio Desember 2018. Berikut petikannya.

FOTO: FOTO: INTEGRITO/SRP

Pak Sutopo kan Doktor bidang Hidrologi, spesifik sekali ilmunya. Mengapa akhirnya mau jadi Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat?

Awalnya saya menolak, karena saya pikir humas itu birokrat *banget*, tugasnya hanya meliput. Saya pun berpikir begitu, saya *kan* doktor, untuk apa saya bekerja jadi humas yang kerjanya hanya begitu.

Tapi kemudian saya mulai merasa humas itu penting karena ternyata humas yang berkomunikasi langsung. Bukan hanya dengan wartawan, tetapi juga dengan masyarakat.

Apalagi saat ini posisi saya kepala hubungan masyarakat. Jika ada kejadian genting dan krisis, harus saya yang tangani langsung karena dampaknya untuk masyarakat. Untuk posisi saya yang sekarang ini penempatan kepala humas harus orang yang benar-benar kompeten.

Bagaimana proses Bapak akhirnya bisa menikmati menjadi humas?

Pak Syamsul Ma'arif, Kepala BNPB saat itu, menempatkan saya di posisi sekarang mungkin melihat karakter saya yang mudah menjelaskan kepada yang lain, mudah bergaul. Apalagi ketika butuh pemberitaan yang jujur tapi tetap menenangkan masyarakat.

Saya selalu membuat rilis sendiri. Saya senang bisa memberikan manfaat dengan data yang saya miliki. Saya selalu kalau punya data, saya berikan semuanya. *Wong* saya tidak kaya dengan menyimpan data. Saya berikan data ke orang lain juga saya tidak miskin. Jadi senang semuanya. Itu yang membuat saya akhirnya menyenangi humas. Termasuk soal melayani masyarakat.

Data bencana kan sering kali membuat masyarakat takut dan panik, bagaimana caranya membuat informasi tanpa membuat orang panik?

Harus paham betul soal

bencana sehingga bisa membuat informasi dengan bahasa yang tepat, jujur, tapi tidak menakutkan. Bahasanya harus memudahkan. Caranya ya *learning by doing*.

Berarti memang sebenarnya jiwanya cocok di humas ya, Pak?

Saya punya prinsip jangan besar karena jabatannya, tapi di manapun kita ditempatkan, besarkanlah jabatan itu. Jadi saya selalu berpikir untuk membuat inovasi-inovasi. Setiap konferensi pers saya harus paparan, saya jelaskan mendalam. Ini buka soal jiwanya di mana, tapi selalu berusaha lakukan yang terbaik.

Bagaimana pengalaman Bapak yang paling menarik saat menangani wartawan?

Kalau sudah jadi humas,





pengalaman yang menarik bukan hanya melayani wartawan, tapi juga masyarakat. Soalnya nomor telepon saya sudah tersebar. Saya harus bersedia melayani 24 jam. Lucunya masyarakat bukan hanya bertanya soal bencana.

Saya pernah diminta mengusir kuntulanak. Karena katanya setelah bencana, di rumahnya jadi banyak hantu. Saya akhirnya bilang akan sampaikan ke petugas.

Ada juga yang menghujat. Saya disebut pengkhianat karena tidak menetapkan sebuah daerah sebagai bencana nasional. Tapi saya *positif thinking* saja. Apalagi kalau liat media sosial, *enggak* boleh *baper*. Orang mau *ngomong* apa saja *enggak* boleh *baper*.

Meskipun lagi sakit seperti sekarang, Pak? *Kan* fisiknya juga jadi melemah, bagaimana caranya tetap bekerja seperti biasa?

Saat pertama kali tahu, pasti *drop* apalagi saat ke Malaysia, umur saya disebut tinggal satu tahun. Saya pikir, ya saya memang sudah cukup melayani wartawan dan masyarakat. Saya *drop* sampai sebulan. Sejak diberi tahu 23 Januari 2018, baru pada bulan Februari saya betul-betul menerima penyakit ini.

Saya tetap bekerja normal dan menjalani semua seperti biasa. Kalau konferensi pers

saya *kan* jarang duduk, karena saya harus menjelaskan yang ada di monitor biar semua mengerti, itu dalam keadaan gemetar. Badan saya sakit. Sampai sekarang saya berbicara dengan gaya saya tetap seperti itu.

Keluarga *enggak* protes Bapak masih saja bekerja padahal sudah tahu sakit?

Mereka *enggak* protes, karena sudah tahu kalau saya diam malah tambah sakit. Karena waktu saya istirahat, saya *enggak* buat pernyataan, saya tetap membaca berita. Saya merasa tidak ada penjelasan yang komprehensif. Yang saya lihat, berita yang muncul malah mena-
kutkan. Bahkan banyak *hoax*.

Makanya saya akhirnya tetap menyampaikan informasi bencana, apalagi kalau ada bencana, ya memang mereka membutuhkan saya, saya harus tetap bekerja. Saya jalani, dan saya ikhlas. Saya tidak berharap diberikan piagam penghargaan, tapi sesuai tanggung jawab saya sebagai jubi BNPB harus memberikan informasi apapun dalam kondisi apapun. Kalau saya mengikuti dokter ya harus *bedrest*.

Biasanya orang yang sudah sakit kanker stadium 4 itu sudah kurus, harus tertidur. Sakit. Saya juga sudah merasa sakit. Sakit di punggung. Tulang punggung saya sudah bengkok. Jalan saya sudah miring karena *nahan* sakit. Tapi saya paksa.



Berarti aktivitas normal seperti ini sudah *enggak* boleh?

Intinya orang sakit kanker itu, satu, tidak boleh *stress*, tidak boleh capek, hati harus gembira. Hatilah yang mengalahkan kanker. Karena kanker itu tidak ada obatnya memang. Ya saya jalani. Saya gembira bisa membuat masyarakat terinformasi dengan baik.

Ini saja dokternya heran, mayoritas orang setelah kemo rambutnya rontok, bahkan gundul. Rambut saya malah tumbuh.

Kanker saya *kan* sudah level terminal, tapi saya tetap *ngantor*. Saya bahagia karena saya berharap ini dicatat sebagai ibadah terakhir saya.

Bagaimana caranya sudah sakit sudah stadium lanjut tapi tetap bekerja dengan bahagia?

Semua orang pasti mati, tapi belum tentu orang yang sakit mati *duluan*. Nah akhirnya saya ketemu kata-kata yang akhirnya saya pegang: makna hidup itu bukan ditentukan panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita bermanfaat untuk sesama.

Akhirnya saya jalani. Saya merasa setiap ada bencana, masyarakat membutuhkan saya, saya harus bekerja●

BIODATA

Nama Lengkap :
Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si., APU

Lahir :
BOYOLALI, JAWA TENGAH, 7 OKTOBER 1969

Pendidikan :
2008 – 2010 :
Doktor (S3) Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan IPB
1998 – 2000 :
Master (S2) Program Studi Pengelolaan DAS IPB
1989 – 1994 :
Sarjana (S1) Fakultas Geografi UGM Yogyakarta

Karir :
2010 – SEKARANG :
KEPALA PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS BNPB
2010 :
DIREKTUR PENGURANGAN RISIKO BENCANA BNPB
2009 – 2010 :
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI MITIGASI BENCANA, PUSAT TEKNOLOGI PENGELOLAAN LAHAN, WILAYAH DAN MITIGASI BENCANA BPPT

Penghargaan :
2018 :
THE FIRST RESPONDERS : THE STRAITS TIMES ASIAN OF THE YEAR 2018
2018 :
THE MOST INSPIRATIONAL ASN 2018 DARI KEMENPAN-RB
2018 :
COMMUNICATOR OF THE YEAR 2018 DARI KOMINFO DAN IKATAN AHLI KOMUNIKASI INDONESIA
2017 :
OUTSTANDING SPOKEPERSON DARI ASOSIASI MEDIA ASING DI INDONESIA
2013 :
PENGHARGAAN DATABASE BENCANA TERBAIK SE ASIA-PASIFIK DARI UNDP

DAPHNE CARUANA GALIZIA

SUARA YANG TAK TERBUNGKAM DARI MALTA

Jurnalis Malta, Daphne Caruana Galizia (1964 – 2017), terpilih sebagai penerima Anti-Corruption Award 2018 dari Transparansi Internasional. Putera dan suami Daphne, Matthew dan Peter, yang menerima penghargaan ini. Bersama Daphne, kandidat yang juga mendapat penghargaan serupa adalah *whistleblower* Spanyol Ana Garrido Ramos.

Anti-Corruption Award diberikan pada 22 Oktober 2018 saat Konferensi Anti-Korupsi Internasional (International Anti-Corruption Conference – IACC) ke-18 di Kopenhagen, Denmark. IACC, yang dihelat pada 22-24 Oktober 2018, bertujuan mening-

katkan kesadaran tentang korupsi. Tak kurang 70 acara digelar selama tiga hari itu, antara lain lokakarya dan pemutaran film antikorupsi.

Daphne Anne Caruana Galizia kelahiran Sliema, Malta 26 Agustus 1964, adalah jurnalis sejak 1987 sekaligus aktivis antikorupsi di Malta. Dia membuat laporan-laporan investigasi korupsi, nepotisme, patronase politik, pencucian uang, serta kaitan antara industri judi online Malta dengan kejahatan terorganisasi.

Laporan tersebut ditayangkan di blog pribadinya, Running Commentary (daphnecaruana-galizia.com) yang mulai beroperasi pada 2008. Daphne juga kolumnis tetap *The Malta Independent* dan *The Malta Independent on Sunday* sejak 1996, serta editor di majalah *Taste & Flair*.



Protes – Peringatan enam bulan pembunuhan Daphne pada 16 April 2018

Hingga kemudian Daphne menindaklanjuti Panama Papers 2016 dengan membuat laporan yang menguak detail lebih lanjut tentang keterlibatan politikus Malta. Langkahnya ini membuat tak sedikit pihak kebakaran jenggot.

Anggota partai Buruh yang berkuasa sampai-sampai mendorong masyarakat memotret dan memfilmkan Daphne di manapun berada, lantas mengunggahnya di media sosial. Wajahnya menjadi sangat dikenal. Pihak-pihak yang tak dapat membantah tuduhan Daphne, akhirnya menyerang kehidupan pribadinya.

Daphne takut bertemu narasumber di tempat umum dan jarang keluar rumah. Semakin sering dia muncul, semakin banyak pula serangan terhadap dirinya. Walau begitu, suaranya tak pernah melunak walau mendapat intimidasi, ancaman, fitnah, hingga tuntutan hukuman.

Kasus pencemaran nama baik yang diajukan Menteri Ekonomi Christian Cardona mengakibatkan uang tunai Daphne disita, bahkan rekening banknya tak dapat diakses. Ketika meninggal, Daphne menghadapi 47 gugatan pencemaran nama baik.

Matthew Caruana Galizia, anak sulung Daphne, adalah jurnalis di Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional di Washington, Amerika Serikat. Dia disarankan untuk tidak kembali ke Malta karena posisinya ber-

bahaya. Ketiga puteranya tinggal di luar negeri.

“Mereka merasa asing di negara mereka sendiri,” ujar sang ayah. “Ini bukan Malta yang mereka kenal. Sudah berubah.”

Langkah Daphne terhenti seiring meledaknya bom yang dipasang di mobil Peugeot 108 sewaan pada 16 Oktober 2017 tak jauh dari rumahnya di Bidnija, Malta.

Dua bulan kemudian, tiga pria ditetapkan sebagai tersangka, yakni kakak beradik George dan Alfred Degiorgio, serta teman mereka Vincent Muscat. Namun sejumlah detektif mencium ada yang janggal. Penangkapan ketiganya di pelabuhan di Morsa diduga sudah bocor duluan. Ponsel mereka sudah dilemparkan ke laut, dan di tangan George tertulis nomor telepon pasangannya.

Walaupun pejabat berwenang Malta menjalankan proses hukum terhadap tiga tersangka sekaligus tak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, namun Peter Caruana Galizia menyebut kepentingan politik menghalangi investigasi polisi. Keluarga meyakini tiga laki-laki itu bertindak atas perintah pemerintah Malta. Kepada *The Guardian*, Peter mengkhawatirkan dalang peristiwa ini tak akan pernah diadili.

Keluarga Daphne meminta pemerintah Malta mengadakan penyelidikan publik untuk menginvestigasi apakah negara Malta juga bertanggung jawab atas kematian Daph-

ne dalam bentuk kegagalan negara melindungi Daphne atau memang ada keterlibatan negara.

Pemerintah Malta membantah hal tersebut dengan mengatakan polisi tak dihalang-halangi atau disetir. Menteri Kehakiman Malta Owen Bonnici menawarkan 1 juta euro bagi siapa saja yang dapat memberi informasi yang mengarah ke orang yang memerintahkan bom mobil.

Tujuh bulan setelah kejadian, terungkap bahwa bom yang menewaskan Daphne diletakkan di bawah jok pengemudi, terbuat dari 300-400 gram TNT, dan dipicu oleh telepon dari arah laut.

Dalam pidato singkat saat penyerahan Anti-Corruption Award, seperti dilansir *transparency.org*, Matthew Caruana Galizia menyampaikan “Bom yang mengambil nyawa Daphne telah memadamkan suara terkuat yang pernah ada di negara kami untuk memperjuangkan integritas. Bom itu juga berupaya merampas harapan kami bahwa suara Daphne terwakili.

“Tak ada yang dapat menggantikan Daphne sebagai jurnalis, apalagi menggantikan pribadinya. Kami kalah dalam perjuangannya melawan korupsi. Namun penghargaan ini mengingatkan agar harapan itu tetap terjaga, juga bahwa sebagian besar masyarakat dunia ikut berharap bersama kami. Sebuah pemikiran yang luar biasa dan sangat berani bagi semua orang yang berjuang untuk memenangkan keadilan dan menegakkan *legacy*-nya.”

Transparansi Internasional menyebut Daphne sebagai jurnalis pemberani dan berhati baja yang mengungkap skandal korupsi politikus serta pihak lain yang berpengaruh di Malta dan di luar negeri. Menyusul kematian Daphne, Transparansi Internasional bersama 18 kelompok antikorupsi, secara terbuka mengakui pentingnya jurnalis investigatif dan kerja mereka, serta mengutuk perilaku barbar yang me-

newaskan Daphne. Mereka juga menyerukan pihak berwenang Malta menyeret pelaku ke pengadilan.

Daphne Project

Ketika Daphne meninggal, investigasi yang dia kerjakan terhenti. Enam bulan kemudian, 17 April 2018, dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 45 jurnalis dari 18 media di 15 negara melanjutkan pekerjaan Daphne, memastikan suaranya tak akan dibungkam. Konsorsium yang disebut Daphne Project ini memberikan dukungan bagi jurnalis di seluruh dunia yang sedang dalam bahaya untuk menyelesaikan investigasi mereka dan menerbitkannya, jika mereka tak dapat lagi mengerjakannya sendiri.

Daphne Project dipimpin Forbidden Stories, organisasi investigatif nonprofit dari Prancis yang mengkhususkan diri menyelesaikan pekerjaan para jurnalis yang dipenjara atau dibunuh. Media yang terlibat dalam Daphne Project antara lain *the Guardian*, *the New York Times*, *Süddeutsche Zeitung*, *Reuters*, *Le Monde*, *La Repubblica*, dan *The Times of Malta*. Para jurnalis ini memeriksa tumpukan dokumen untuk memperdalam investigasi Daphne ke arah korupsi dan pencucian uang.



INILAH PEDAGANG CLICKBAIT DARI KOSOVO

Tahukah? Di Pristina, ibukota Kosovo, pekerjaan yang khusus menjual kabar bohong. Salah satu pelakunya bernama Burim. Dia menjual kabar bohong dan sensasional ke audiens Barat.



Tahun lalu menjadi masa-masa subur penyebaran informasi sesat, sebagian bersifat politis, sebagian lagi bersifat kekerasan. Alasannya cuma satu: klik. Untuk menggaet audiens, pedagang menyiapkan belasan *Facebook page* dari yang bertema agama sampai destinasi liburan. Jumlah *audien*nya mencengangkan, 90 ribu *likes*; 240 ribu *likes*; bahkan 26 ribu *likes*.

Burim bisa membuat kontennya dilihat 1 juta orang, lantas mengubah klik tersebut jadi pendapatan iklan, dari platform media sosial maupun situs eksternal. Dia mendapat sekitar 600 euro atau setara Rp 10 juta per hari.

Ketika pada 2018, Facebook menutup banyak *groups* dan *pages* yang semata-mata *click-bait*, pendapatan Burim merosot dari 600 euro per hari menjadi 100 euro. Namun jumlahnya tetap termasuk besar bagi orang-orang seperti pria ini, yang sebelumnya pelayan restoran dengan penghasilan tujuh euro per hari.

Menyebarkan kabar bohong kini kurang menguntungkan, dan mungkin juga kurang berdampak secara politis. Namun demikian praktik tersebut masih tersebar. Tak kurang 49 persen, artinya ribuan, anak muda Kosovo masih membaca kabar bohong. Sumber: BBC

BANK INI SEWA KONTRAKTOR UNTUK ISI AMPLOP

Tahukah? Royal Bank of Scotland (RBS) menyewa kontraktor dengan bayaran 400 pounds atau setara Rp7,6 juta per hari hanya untuk memasukkan surat ke amplop. Itu uang dari pembayar pajak *lho*.

Bank yang 62 persennya milik pemerintah Inggris itu membayar 330 pounds per orang ditambah PPN untuk menjalankan tugas-tugas rutin seperti mengirim surat asuransi ke nasabah. Jumlah sebesar itu dibayarkan pada 2017 dan 2018 di sebuah kantor di Manchester, Inggris. Angka pastinya belum diketahui karena RBS belum membuka jumlah orang yang menerima pembayaran. Pekerjaan mengisi amplop biasanya dibayar dengan upah minimum.

Menurut para pekerja, awalnya mereka ditugaskan sebagai spesialis, tapi karena manajemen berantakan,

mereka kemudian diminta memasukkan surat ke amplop-amplop.

RBS memberi pembelaan terkait upah besar tersebut, “Kami bukan menyewa kontraktor dengan angka tersebut untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini. Kontraktor dibayar sesuai dengan tarif industri, pengalaman, dan keterampilan mereka. Kami menggunakan jasa pekerja jangka pendek ini untuk memastikan kami dapat memenuhi komitmen dengan pelanggan kami.”

Kondisi RBS parah sejak krisis



keuangan yang berpuncak pada 2008. Bank ini terpaksa membayar miliaran pounds akibat salah jual asuransi perlindungan pembayaran (PPI) serta salah kelola sekuritas berbasis mortgage. Reputasinya pun buruk dalam melayani nasabah kecil. Sumber: Independent

CIPTAKAN LABORATORIUM PEMUDA DESA

SEJAK 2015 DANA DESA MENGALIR DARI KANTONG APBN UNTUK DESA-DESA DI SELURUH TANAH AIR. BESARANNYA BERTAMBAH SETIAP TAHUN. LANGKAH INI DILAKUKAN AGAR DESA TERBANGUN. PERAN PEMUDA DIHARAPKAN JADI SALAH SATU PEMBEDA. SUPAYA DANA DESA TAK DIREKAYASA.

“Seribu orangtua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia.” Itulah kalimat yang

digemuruhkan Soekarno teruntuk pemuda bangsa Indonesia. Ya, pemuda memang sudah jadi sorotan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terbebas dari penjajahan. Sang Proklamator tahu betul bahwa masa depan Indonesia ada di tangan pemuda.

Hingga kini kata-kata bijak dari Soekarno tetap terngiang, bukan hanya jadi kenangan namun energi baru untuk tak bosan menyampaikan akan peran pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Ketjil Bergerak menyerukan “Energi Muda Desa Untuk Negeri” lewat program Sekolah Pemuda Desa 2018.

Sekolah Pemuda Desa ialah program pelatihan bagi pemuda desa yang membahas mengenai seluk beluk Dana Desa dan pelibatan pemuda dalam mengelola serta mengawasi Dana Desa. Program ini adalah kali kedua yang melibatkan 394 desa di seluruh wilayah DI Yogyakarta.

Yogya tak lepas dari ciri kebhinekaan dan toleransi yang tinggi, karena itulah provinsi ini dijadikan program piloting pertama kegiatan Sekolah Pemuda Desa. Berawal dari 2017 lanjut hingga tahun kedua di 2018.

Banyak perubahan terjadi, khususnya pemuda desa yang kini tak takut mengabdikan. Pemuda ibarat seperti pengharum ruangan dalam kemasan, jika perekatnya tak dibuka, tentu wanginya tak menyebar. Keharuman itu ialah ide segar para pemuda-pemudi desa, mereka bisa berkembang atau tidak tergantung kesempatan yang mereka terima.

Sekolah Pemuda Desa lahir untuk membuka perekat itu, jadi wadah bagi sebuah kesempatan yang diidamkan. Di sini pemuda desa dibebaskan untuk berkreasi, menuangkan kegelisahan tentang desanya dengan solusi-solusi liar namun cemerlang. Di Seko-

lah Pemuda Desa ini mereka belajar tentang karakter, kepemimpinan, juga berpikir kritis.

Tentang alur pemanfaatan Dana Desa hingga pemuda bisa ikut andil dalam pengumpulan ide, jadi topik utama dalam kegiatan yang dilakukan di Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM), Sleman, DIY.

Para pemuda yang ikut dalam Sekolah Pemuda Desa diwajibkan untuk mengirimkan proposal permasalahan yang terjadi di desanya masing-masing, kemudian diseleksi. Dari 60 proposal terpilihlah 20 proposal, alasannya sederhana saja, agar setiap kabupaten di Yogya masing-masing punya lima proposal permasalahan. Lima proposal dari Bantul, lima dari Gunungkidul, lima dari Kulon Progo, dan lima lainnya dari Sleman. Satu proposal terdiri atas tiga orang pemuda desa yang nantinya akan mengikuti pembelajaran selama tiga hari di BBLM.

Ide dalam proposal yang telah mereka tulis akan menjadi contoh pembahasan dalam kelas tentang Dana Desa. Di dalam kelas tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). Rancangan tersebut disusun serta ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa.

Sang kepala desa kemudian akan membentuk Tim Penyusun RKP Desa. Di sinilah keterlibatan pemuda di mulai. Dengan kata lain, pemuda diberi kesempatan besar untuk berpartisipasi secara sah dan tertulis sebagaimana prosedur penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Undang-undang.

Hal-hal teknis seperti itulah yang dibahas secara lengkap kepada para peserta yang lolos dalam Sekolah Pemuda Desa. Harapannya agar perwakilan dari pemuda desa tersebut dapat kembali ke desanya masing-masing untuk berkontribusi secara nyata.

Pemuda desa dapat terlibat dalam Tim Penyusun RKP Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa, memanfaatkan fasilitas tersebut dengan cara-cara yang akuntabel, serta mampu melakukan model pengawasan yang ketika mereka melihat kejanggalan, mereka dapat mengkritisnya secara langsung.

Mark-up anggaran, tidak transparan,

rekayasa, nepotisme, laporan fiktif dan tidak akuntabel adalah bentuk-bentuk penyelewengan penggunaan Dana Desa. Belum lagi pada proses pengawasan, kendala-kendala yang ditemui juga tidak kalah bermacam-macam seperti prosedur yang sekadar formalitas, sekadar memenuhi syarat administratif hingga keterlambatan deteksi penyimpangan.

Pemuda desa harus mengetahui itu semua agar Dana Desa tak menguap begitu saja. Nilai yang fantastis setiap tahun hingga menyentuh angka satu miliar untuk setiap desa menjadi magnet tersendiri bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Di Sekolah Pemuda Desa inilah mereka digembleng untuk tahu akan segala, bukan hanya Dana Desa tapi juga pendidikan karakter. Modelnya berbeda dengan sekolah formal. Di Sekolah Pemuda Desa, peserta diajak untuk saling berinteraksi dan tak malu menyuarakan pendapatnya. “Ayo siapa lagi yang mau bicara tentang desanya? Jangan takut dengan *microphone*, justru di sini kalian belajar bagaimana ngomong di depan banyak orang,” ujar Ardiansyah Putra, mentor dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dr.H. Yusa Efen, M.Pd, Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Direktorat Masyarakat Desa, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengatakan bahwa muda bukan soal usia tapi jiwa dan semangat muda yang tertanam di pikiran.

“Tanggung jawab yang berat itu berada di pundak kalian semua, bagaimana keadaan Indonesia 20-50 tahun ke depan itu berada di pundak kalian,” ujar Pak Yusra kepada seluruh peserta.

Ia juga mengatakan bahwa program Sekolah Pemuda Desa sangat membantu kerja pemerintah dalam rangka mencerdaskan pemuda desa khususnya mengenai Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa wajib dikawal bersama agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya beli sehingga pada akhirnya pun meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri.

Ardiansyah Putra, Direktorat Pendidikan dan Masyarakat, KPK, dalam materi yang disampaikan pun memaparkan bahwa Sekolah Pemuda Desa bisa menciptakan jejaring baru bagi pemuda desa yang terpilih untuk bisa saling bertukar informasi mengenai kondisi desanya. “Karena yang sudah terjadi di Sekolah Pemuda Desa 2017, kami membuat grup komunikasi sehingga mereka bisa saling belajar satu sama lain. Ada desa yang sudah berkembang belajar dengan desa yang sedikit lebih maju, ada yang masih ketinggalan belajar dengan yang sudah berkembang, dan seterusnya.”



BERANI KEMBANGKAN DESAKU

Septiasih Windiasari Utami, berusia 24 tahun kala mengikuti Sekolah Pemuda Desa 2017. Ia adalah salah satu perwakilan dari Kabupaten Gunungkidul yang proposalnya disetujui dan berhak mengikuti Sekolah Pemuda Desa 2017 bersama dua orang rekannya.

Epin begitu ia akrab disapa, menceritakan secara khusus pengalamannya selama mengikuti Sekolah Pemuda Desa 2017 kepada integrito. Proposal yang ia kirimkan bersama timnya ialah mengenai sekolah alternatif non-akademik yang disebut Sekolah Beladega (Belajar Asyik Desa Gari). Ia menuliskan persoalan yang ia hadapi dalam mengelola Sekolah Beladega dalam proposalnya termasuk bagaimana cara agar sekolah alternatif tersebut bisa didanai oleh desa.

“Saat itu, kami diberi masukan bahwa program ini bisa dimasukkan ke dalam Dana Desa. Di Sekolah Pemuda Desa dijelaskan bahwa dana pendidikan bisa didapatkan dari Dana Desa,” ujar Epin.

Dalam kesehariannya Epin ialah seorang bidan di rumah sakit ibu dan anak, namun ia sangat peduli tentang isu pendidikan khususnya pendidikan berbasis keterampilan bagi

anak-anak SD di desanya. Oleh karena itu, Epin aktif di Karang Taruna Desa Gari untuk mengurus soal pendidikan, ia juga menjabat sebagai Sekretaris di Karang Taruna Sub-Unit Padukuhan dan Sekretaris II di Karang Taruna Kabupaten Gunungkidul.

Tak hanya Epin, ada pula Septian Nurmansah yang berasal dari Desa Gari. Beruntung Desa Gari terpilih dua tim di mana kedua proposal tersebut dinilai oleh juri sudah matang dan mampu merinci masalah di desanya dengan baik.

“Saya mengajukan program yang memang sudah berjalan, namanya Pasar Ekologis Argo Wijil. Saya juga masuk sebagai BUMDes, di situ saya sebagai sekretaris BUMDes,” ujar Septian yang biasa disapa Asep.

Pasar Ekologis Argo Wijil ialah pasar yang dibangun diatas tanah bekas penambangan batu gamping. Dahulu berupa gunung yang begitu menjulang, jika digambarkan posisi pasar ini terletak di sisi timur gunung. Tahun 1995 masyarakat setempat mulai menggali secara manual hingga menjadi mata pencaharian utama. Roda ekonomi berputar di situ. Lama kelamaan kegiatan tambang jadi tak terkontrol, hingga terbentuk kubangan sampai 15 meter.



Tambang batu gamping yang semakin membahayakan ini pun tertolong konservasi. Dia digali kemudian direklamasi dan dibangun pasar. “Setelah dibangun BUMDes, kami dibimbing untuk membuat BUMDes oleh teman-teman UGM untuk pengelolaan pasar. Kalau kelembagaannya sudah jadi baru mau bikin pasar apa,” ujar Kepala Desa Gari, Widiyanto.

Widiyanto sadar betul dirinya memerlukan bantuan pemuda desa untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Ia menganggap para pemuda di desanya lebih mengerti hal-hal soal kekinian dan banyak ide untuk mengembangkan desa. “Saya kumpulkan Karang Taruna untuk meminta pendapat pasar apa yang cocok, kemudian Asep mengusulkan pasar kuliner tradisional. Lalu mereka mengadvokasi ke media sosial pakai poster yang ringan tapi menarik.”

Asep pun senang dengan keterbukaan Kepala Desa Gari yang memberikan banyak keleluasaan untuk anak muda bisa berkarya, “Ketika kita diberi ruang di situ otomatis kita akan lebih bersemangat, kemudian kita sangat diuntungkan karena akan lebih mudah untuk membuat acara,” ceritanya dengan mata optimisme.

Cerita mengenai Pasar Ekologis Argo Wijil adalah satu dari keberhasilan yang dicapai karena adanya ruang dan komunikasi yang baik antarelemen desa. Di sisi lain para pemuda semakin berwawasan ketika Sekolah Pemuda Desa menampung aspirasinya dan memberi arahan terkait prosedur Dana Desa yang bisa digunakan untuk merealisasikan program-programnya.

“Saya jadi ngerti proses untuk bisa mencapai Dana Desa, harus ikut MusDes dulu atau Musrenbang dulu, bagaimana koordinasi sama pemerintah desa dan akhirnya kita bisa diikutsertakan secara aktif dan bisa menjadi eksekutor di desa,” ungkap Epin.

Tapi ada juga kisah lain mengenai langkah besar pemuda desa untuk membangun desanya namun terkendala dengan sistem pemerintah di desanya. Dengan judul Desa Agroeduwisata, Ngudi Prasetyo dan teman-temannya mencoba menggali potensi Desa Ngentakrejo atas sawah yang begitu luas.

Ia memetakan bahwa banyaknya lahan sawah masih dikerjakan oleh orang tua, se-

mentara kaum muda tidak mau bertani. Hal ini menjadi kegelisahan dan juga tantangan Ngudi dan timnya untuk memberdayakan luasnya lahan sawah menjadi kegiatan bertani yang menyenangkan bagi kaum muda. “Kami mengangkat dari segi edukasi, harapannya lahan-lahan itu bisa kita olah dan bisa menjadi wisata edukasi,” ujar Ngudi.

Langkah Ngudi memang baru sekadar impian, belum ada kegiatan bertani yang melibatkan anak muda di desanya secara berkala. Namun Ngudi tetap menaruh optimisme, sinergitas ke pemerintah desa sudah ia lakukan di awal tahun 2018. Mereka juga sudah melakukan pengajuan untuk dapat mengakses anggaran Dana Desa melalui Musdes, “Dan Alhamdulillah diterima,” cerita Ngudi.

Mereka juga sampai tahap Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) namun kondisi tahun 2018 mengharuskan Ngudi dan timnya bersabar, karena Kepala Desa Ngentakrejo baru ada pergantian. “Sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi, karena harus menunggu Kades yang terpilih,” ungkapnya lirih.

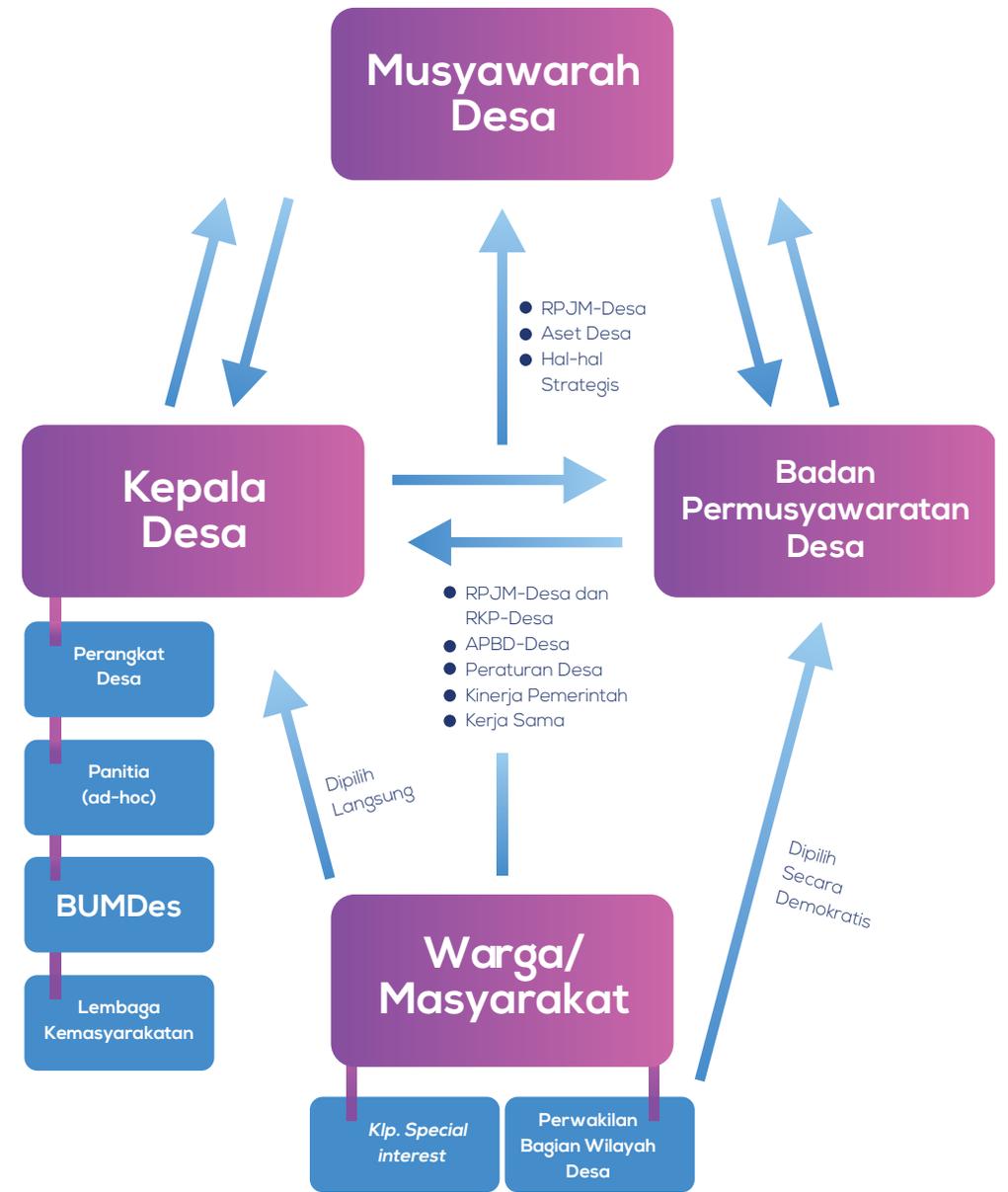
Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi yang menjadi narasumber dalam kelas Sekolah Pemuda Desa 2018, bercerita sedikit mengenai pandangan pemerintah desa terhadap anak muda, ia mengatakan bahwa pandangan itu tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau lembaga yang lain.

“Jadi itu memang terkait kapasitas politik, kemampuan kepala desa untuk mengarahkan kebijakan itu sangat tergantung dari proses politiknya, sebenarnya kalau mau dari prosesnya ya berangkat dari terpilihnya kepala desa melalui proses politik yang baik,” ungkap Wahyudi.

Ia membeberkan bahwa kunci sederhana dalam membangun politik yang bersih adalah tergantung warga desanya. Pemerintah desa harus ada upaya untuk serius mendidik warga melalui civil education, pendidikan kewargaan, relasi antara negara dan warga desa, “Karena kadang-kadang warga desa kita juga enggak adil kok, di satu sisi mereka masih terima uang, tapi di sisi lain mereka masih berharap untuk dapat pemimpin yang baik, itu yang mustahil,” tegasnya kepada integrito



Banyak masyarakat desa yang belum tahu alur tata kelola pemerintahan di desanya, di mana peran pemuda desa, dan hingga tahapan apa pemuda desa dapat ambil bagian. Berikut adalah bagan sederhana tentang Prinsip Tata Kelola Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bagan ini menunjukkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).



SUMBER: BUKU SAKU DANA DESA EDISI ANAK MUDA

DARI DEN HAAG KE YOGYAKARTA

Energi Mudamu, Senjatamu! Kalimat itu menjadi pegangan sebuah komunitas Yogya bernama Ketjil Bergerak. Bagi pegiat sosial, seni dan budaya pasti tak asing dengan nama Ketjil Bergerak (KB). Sebuah organisasi independen asal DI Yogyakarta yang digerakkan oleh pasangan suami istri nyentrik, Greg dan Vani.

Kali ini, tahun kedua Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Ketjil Bergerak merealisasikan Sekolah Pemuda Desa. Turut menggendeng pula Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai pelaksana pokok Sekolah Pemuda Desa tahun ini.

Berbekal pendekatan seni dan budaya, Greg dan Vani mampu menggenggam pemuda-pemudi se-Yogyakarta dan mengemas program Sekolah Pemuda Desa dengan cara menyenangkan namun juga kritis.

Di sela kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM), Sleman, Yogyakarta, dua sejoli ini berbagi cerita di balik konsep Sekolah Pemuda Desa kepada integrito.

Bagaimana awal KB dipercaya mengonsep acara Sekolah Pemuda Desa?

Awalnya itu saat 2017 kita ikutan programnya KPK, *Community Development and Public Participation* di Den Haag. Selama hampir

tiga minggu kita belajar di sana dan kita dapat *back home action plan*, jadi setelah pulang dari Belanda kita ditugaskan mau bikin program apa. *Nah* waktu itu Ketjil Bergerak punya ide untuk..apa ya soal dana desa.

Waktu itu dana desa *kan* masih sangat kencang banget ya. Bagaimana *sih* anak muda ini bisa dilibatkan seperti perencanaan pembangunan di desa, kemudian bagaimana caranya anak muda desa mampu mengawasi dana desa. Jadi waktu itu kita mengkonsep yang namanya Sekolah Desa. Sekolah Desa yang pertama itu khusus untuk berbicara tentang dana desa, *nah* itu dihadiri juga oleh pak Saut di Desa Giri Kerto, Turi, Sleman.

Artinya itu sudah jadi sekolah pemuda desa?

Belum. Sekolah Desa itu kayak semuanya boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut, dari desa manapun dan itu gratis.

Lalu?

Lalu kita berpikir, *oh* ya sudah bikin saja Sekolah Desa yang *enggak* cuma Desa Giri Kerto saja yang tahu tapi kita bisa *upload* itu ke Instagram kemudian teman-teman yang punya keresahan yang sama bisa ikut dan datang. Ditambah ada tantangan dari Mas Arsa, Humas KPK, pada saat itu, dia bilang "Van, Greg kalian berani *enggak* ngundang anak muda di seluruh desa di DIY?"

Desa kan ada 397 desa di DIY, kami bilang berani, *nah* waktu itu *lah* Mas Arsa yang menjembatani kami dengan Kemendes.

Kenapa Yogya jadi targetnya?

Satu, ini *kan* kota musik sehingga orang-orangnya lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Kedua, Yogya itu kota seni jadi orang-orangnya lebih terbuka juga ketika kita menggunakan pendekatan seni. Ketiga, karakternya senang *nongkrong*, senang berkumpul, bercengkerama, bergotong royong, komunalitasnya masih kental. Selama ini tiga hal itu menjadikannya lebih mudah. Tapi tentu sangat bisa diaplikasikan juga ke daerah lain.

Bagaimana cara mengumpulkan 397 desa untuk mengikuti kegiatan Sekolah

Pemuda Desa?

Awalnya *pas* Sumpah Pemuda 2017 kemarin, 27 Oktober kita bikin di Youth Center Yogya itu Sarasehan Pemuda Desa. Sarasehan Pemuda Desa ini mengundang seluruh 397 desa se-DIY, ada sekitar 500 orang anak muda yang datang karena waktu itu Pak Eko, Menteri Desa datang sama Pak Agus Rahardjo, Ketua KPK. Di situ kita sekalian menyosialisasikan Sekolah Pemuda Desa, "Ikuti Sekolah Pemuda Desa 2017." Maka terwujudlah Sekolah Pemuda Desa yang pertama itu di sini juga di BBLM. Kita bikin poster yang bagus, kemudian open call proposal, bentuknya adalah teman-teman desa di 4 kabupaten DIY di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, sama Kulon Progo boleh mengirimkan proposal yang isinya adalah potensi desa mu apa, kemudian masalah di desa mu apa, dan kamu punya solusi program yang di tawarkan mau seperti apa.

Setelah open call, berapa yang akhirnya mendaftar?

Waktu itu ada 60 proposal yang masuk dan kita seleksi menjadi 20 proposal. Ke-20 proposal ini kami pilih agar bisa mewakili empat kabupaten, jadi satu kabupaten itu terwakilkan dengan lima proposal. Misalnya 5 proposal dari Sleman, 5 proposal dari Gunung Kidul. Proposal yang terpilih itu sudah melewati seleksi ketat, artinya dalam proposalnya dia sudah bisa *nge-break down* permasalahan di desanya serta ada solusinya.

Dari Sekolah Pemuda Desa pertama, tahun 2017, apa yang bisa dilihat dari pemuda-pemuda desa tersebut?

Dari hasil itu memang kelihatan sekali mana desa-desa yang memang *champion*, seperti Desa Gari, dia setelah ikut sekolah pemuda desa *tuh* langsung semangatnya tinggi banget, *pede*, dan desa lainnya juga begitu seperti Giri Kerto, terus juga Ngudi dari Ngentak Rejo itu semua bagus. *Nah* setelah selesai pemuda desa kita masuk *nih* dalam grup jaringan Sekolah Pemuda Desa di WhatsApp. Di grup tersebut pembicaraannya enggak melulu tentang dana desa. Semua bisa *sharing* tentang banyak hal untuk nantinya dapat kita bedah di Sekolah Desa.

Sekolah Desa itu seperti pembelajaran terbuka di satu desa begitu?

Iya, betul. Dengan jaringan Sekolah Pemuda Desa tadi, si pemuda bisa *sharing* yang

mereka mau tahu dan perlu pembelajaran atau panduan dari kita tuh soal isu apa, nanti kita datang ke desa tersebut dan buat forum pembelajarannya.

Lalu untuk Sekolah Pemuda Desa kedua ini, sejauh apa peran KB?

Kami meng-*approach* alumni Sekolah Pemuda Desa yang pertama untuk mendiskusikan dan ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum SPD 2018. Kita partisipatif juga melibatkan mereka. Sehingga SPD 2 ini lebih variatif, menarik dan lebih memasukkan apa yang menurut teman-teman SPD 1 inginkan. Misal, dulu ada pembicara di luar Yogya, nah menurut teman-teman SPD 1 itu kurang ngena, jadi mereka minta untuk pembicara dari Yogya saja.

Harapannya ke depan?

Harapan kita, Sekolah Pemuda Desa kan sudah ada dua alumni, kita maunya mereka bisa berdiri sendiri. Walaupun enggak ada kita harusnya bisa tetap jalan tapi kita juga ingin bikin Sekolah Pemuda Desa di provinsi lain. Kemudian ini bisa jadi embrio dari gerakan jaringan teman-teman pemuda desa sendiri dan tentu melibatkan semakin banyak komponen di pemerintahan, misalnya kementerian apa juga ikutan dan pastinya agar ini bisa *suistainable*, *sinergis* dan *harmonis*. Pelan-pelan *sih*, *hehe*, sebisanya ●



TARI JAIPONG

PESAN KESETARAAN DALAM KESENIAN



Berpuncak pada akhir 1990-an, hingga akhirnya kalah oleh organ tunggal, kesenian Jaipong/Jaipongan adalah hiburan favorit masyarakat Sunda Pesisir dalam merayakan siklus hidup, panen, atau hari besar nasional. Di situ ada penari, disebut sinden, dalam balutan kebaya pendek mengikuti lekuk tubuh, menari diiringi alat musik kendang, rebab, calung, gong, dan kenongan.

Di bawah panggung ada kemeriahan lain, yakni penonton (umumnya laki-laki) yang ikut menari sambil sesekali melemparkan seruan-seruan cabul ke arah sinden. Bau alkohol menguar di udara. Panggung Jaipongan yang dimulai begitu malam tiba akan berlangsung hingga subuh menjelang.

Berbeda dengan Sunda Priangan yang cenderung halus dan mriyayi, karakter masyarakat Sunda Pesisir, seperti Karawang dan Purwakarta, adalah terbuka, blak-blakan, bahkan cenderung kasar. Hal tersebut tak lepas dari riwayat Karawang sebagai pelabuhan yang ramai berkat keberadaan Sungai Citarum sebagai urat nadi perekonomian dari era Kerajaan Tarumanegara (abad ke-4 sampai ke-7 M) hingga Kerajaan Sunda Galuh (abad ke-11 hingga ke-16 M). Para pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa sudah datang ke Karawang jauh sebelum kehadiran pemerintah kolonial Belanda ke Nusantara.

Pada masa penjajahan Belanda, Karawang adalah karesidenan (di dalamnya termasuk Kabupaten Purwakarta sekarang) bersama empat karesidenan lain di Jawa bagian barat, yakni Cirebon, Banten, Priangan, dan Bata-



via-Mr.Cornelis (sekarang Jakarta, Bekasi, Tangerang). Belanda menjadikan Karawang penghasil utama beras dan hasil perkebunan berupa teh dan karet.

Beragamnya bangsa yang singgah dan bermukim itulah yang membuat Karawang multikultur dengan karakter masyarakat yang dinamis dan terbuka. Selain bahasa, ekspresi keterbukaan itu kemudian tampak dalam bentuk kesenian tradisional Jaipong.

Jaipong adalah ciptaan seniman Karawang bernama Suwanda, di Padepokan Suwanda Group, Karawang pada 1976. Kesenian yang diidentikkan dengan goyang, *gitek* (gerakan bahu), dan *geol* (gerakan pinggul) itu menggabungkan seni tradisi Karawang, antara lain Ketuk Tilu, Topeng Banjet, pencak silat, wayang golek, dan tarling. Baru kemudian koreografer Gugun Gumbira membawa Jaipong ke Bandung dan menciptakan jenis-jenis baru tari ini.

Jaipong memungkinkan interaksi yang hidup dan terbuka antara penari dan penonton dalam bentuk penonton ikut menari dan beberapa dari mereka memberi saweran. Di antara penyawer, ada satu yang rajin *nyawer* setiap Jaipongan digelar, dengan jumlah saweran paling besar, disebut bajidor. Sambil mengimbangi gerak tari penari Jaipong, bajidor terkadang menjamah, mencolek,

meremas, atau berperilaku jahil lainnya.

Dalam laporan I Dewa Ketut Wicaksana, Jaipongan Erotik Terhegemoni (1997), bajidor biasa menyiapkan uang Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk saweran saja.

Sinden, ledhek, ataupun ronggeng sulit menghindarkan diri dari jargon-jargon *sexual suspect*, perempuan penjaja seks, penggoda laki-laki, dan sebutan lain yang sejenis; seindah apapun mereka menari. Pelabelan serupa, mereka terima juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Perempuan penggiat seni tradisi seolah-olah luput dari perjuangan kesetaraan gender yang berkuat pada kelas menengah urban yang cenderung elitis.

Ada realitas kekuasaan di luar diri si perempuan, dalam bentuk laki-laki dan atau otoritas keagamaan, yang kemudian menggiring mereka ke dalam pembungkaman untuk berekspresi secara bebas dan mandiri. Kalangan agamawan memberi fatwa pelanggaran, berbasis syariat agama; penguasa daerah membuat seruan terbuka agar pakaian penari tertutup; belum lagi komersialisasi seni tradisi dengan dalih penertiban seni budaya nasional.

Di balik kesan sinden tak lebih sebagai penggoda yang siap menjual tubuhnya, ada pesan lain dalam kesenian rakyat Jaipong. Miftahussurur dalam "Survival Strategic"



Perempuan Seni Tradisi (2006) menuliskan, di dunia panggung Jaipong inilah penggambaran adanya proses saling menundukkan, saling menikmati, dan saling memperdayakan. Laki-laki berusaha memperoleh kesenangan sepuas-puasnya meskipun mendapat label sebagai penikmat seks karena kecenderungannya yang *sexual oriented*.

Sinden bebas menentukan sasaran saweran. Berapapun banyak uang yang disawerkan, jika perilaku penyawer membuat sinden tidak berkenan dan akhirnya tak memberi tanggapan positif, maka si lelaki “bukan siapa-siapa”. Luluh makna kelelakiannya.

Meski secara implisit sinden tak keberatan dijadikan objek tontonan, tapi semua itu tetap harus dibayar dengan pemenuhan material yang keluar dari saku laki-laki. Terkadang, sinden terpaksa siap menjadi mangsa produksi, akan tetapi tetap cerdas dengan meraup keuntungan sesuai dengan yang diharapkannya.

Dalam masyarakat Banyumas, ronggeng bahkan menempati posisi istimewa, yakni sebagai sakti atau pusaka suatu desa. Hanya orang-orang terpilih yang dapat menjadi ronggeng. Menari bersama ronggeng adalah sebuah prestise dan pengakuan atas status sosial seseorang, apalagi sebagai orang yang pertama kali diajak menari oleh ronggeng, yang biasanya orang terpendang.

Ada azas saling-manfaat antara perempuan seni tradisi dengan ruang tinggalnya. Sederhananya, menurut Miftahussurur, para sinden, ledhek, atau ronggeng, punya kesempatan dan hak untuk bersikap dan berbicara. Inilah strategi bertahan dari gempuran konstruksi budaya, negara, dan agama. Strategi ini tak dapat dirumuskan dalam satu konsep baku sebab sifatnya sangat heterogen, cair, subjektif, dan multiperspektif.

Mengutip Purnawan Andra dalam Perempuan sebagai “Benda Pusaka” (2010), “Ideologi gender yang memberikan otonomi besar pada perempuan telah diperjuangkan melalui kehidupan di dunia seni pertunjukan tari. Itu berlaku berbarengan dengan kebebasan yang mereka peroleh untuk bergerak dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan credo ‘perjuangan’ perempuan, yaitu ‘kesetaraan hak, kesetaraan kesempatan: kemajuan bagi semua’.”

Kebutuhan untuk melakukan “pemberdayaan” menjadi tak relevan bagi perempuan seni tradisi. Pun stereotipe bahwa perempuan seni tradisi selalu mendapatkan pelecehan seksual perlu direnungkan ulang. Khittah kesenian adalah netral gender, yang bekerja untuk menganyam kebenaran dan meniti puncak-puncak kemanusiaan. Pun penggiat seni, sebagai orang merdeka, semestinya melihat kebenaran dengan spirit yang bebas●

KELAS MULTIKULTURAL



MINIATUR BUDAYA INDONESIA DI CINTAKARYA

Sekolah ini dikenal lewat programnya yang terbilang berani-setengah-nekad bernama Kelas Multikultural di tempat yang terbilang monokultural, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Monokultural mengacu pada agama penduduk Desa Cintakarya yang seluruhnya Islam.

Di tengah desa demikian seorang anak muda bernama Ai Nurhidayat pada 2016 mendatangkan 25 anak dari 11 provinsi, berlatar belakang macam-macam budaya dan agama. Anak-anak ini memenuhi undangan Yayasan Darma Bakti Karya, yang diketuai Ai, untuk bersekolah selama tiga tahun di SMK Bakti Karya Parigi, sekolah vokasi bidang multimedia, di Desa Cintakarya. Siswa tak perlu membayar. Tiket pergi pulang, asrama, uang sekolah, semua gratis.

Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 5 November 2018 Ai Nurhidayat menjelaskan alasan dibuatnya program Kelas Multikultural. “Ada 1340

suku di Indonesia. Berapa yang pernah kita bertemu, mengenal langsung, hidup bareng, bernegosiasi mulai dari baunya, menghadapi ekspresi ego beda-beda? Paling-paling hanya satu-dua suku.”

“Di tempat kami ada lima siswa Papua, dari subsuku yang berbeda-beda, dan mereka masing-masing tidak saling mengerti bahasanya. Siswa Bengkalis dan Bengkulu yang kita kira sama-sama berbudaya Melayu, ternyata bahasanya ngga nyambung.”

Siswa-siswa itu menjadi duta bagi daerahnya, bagi budaya dan agamanya. Setelah dikumpulkan di sekolah ini mereka belajar tentang negosiasi dan adaptasi. Yang disasar adalah pertemanan, dengan harapan jika suatu hari berhadapan dengan konflik horison-tal, mereka dapat menyelesaikannya dengan cara menempatkan diri sebagai teman yang betul-betul mengenal budaya orang yang dihadapi.

“Kalau ada acara-acara Maulid Nabi, Rajaban, murid-murid nonmuslim itu pakai peci,

pakai sarung, nyuguhih teh ke Ketua RT. Mereka juga ikut bantu bangun masjid,” ucap Ai. “Tapi saya pernah bilang, ‘Kalau datang ke ngaji jangan pakai salib ya, malu gue hahaha...’”

Latar belakang penduduk Kabupaten Pangandaran hanya 10 persen warga yang kuliah di luar daerah, lima persen kuliah di Pangandaran, dan 85 persen lainnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. “Artinya, yang merasakan lintas agama, lintas budaya, lintas suku hanya sepuluh persen,” ujar Ai.

Tentu sebuah pemandangan yang luar biasa bagi warga ketika tiba-tiba desa mereka jadi berwarna-warni dan terdengar bahasa yang tak pernah terdengar sebelumnya. Cakrawala yang sebelumnya sebatas Pangandaran dan sekitarnya, kini menjulur sampai ujung timur dan ujung barat Indonesia.

Keterkejutan itu diekspresikan dengan cara macam-macam, dan seringkali lucu. Contohnya, karena baru sekarang bertemu langsung dengan anak Papua, anak Papua itu diajak wefie oleh warga, bergantian tak sudah-sudah sampai si anak kelelahan.

Pernah pula Ai dilapori ada anak bertengkar mulut. Setelah didekati dan omongan mereka disimak, dua anak dari Flores itu bukan sedang bertengkar. “Orang Flores kalau ngomong memang gitu, tinggi suaranya, dikira lagi berantem,” kata Ai.

Di lain waktu, ada laporan anak Flores berkelahi dengan anak Aceh. Kali ini betul-betul adu mulut, hanya saja mereka menggunakan bahasa masing-masing karena belum terbiasa berbicara bahasa Indonesia saat emosi meluap.

Soal makanan, lain lagi ceritanya. Ai sempat heran ketika anak Flores makan daun kelor mentah. “Di Pangandaran, tidak ada yang makan daun kelor. Itu buat mengusir hantu,” ujar Ai.

Dari Komunitas Sabalad

Ide membuat kelas program ini bermula saat ketika Ai balik kampung Desa Cintakarya, Pangandaran selulus kuliah dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Jakarta pada 2012. Dia mendapati sulitnya menemukan teman bicara yang “nyambung”, kawan-kawan SD-nya dahulu tak ada yang melanjutkan kuliah, tak ada tempat baca di desanya, dan tak ada rumah yang menyim-

“Karena perdamaian tidak bisa dibiarkan begitu saja lalu jadi damai, harus diusahakan,”

Ai Nur Hidayat,
Penggagas Kelas Multikultural



pan buku. Ajang berkumpulnya remaja hanyakah saat hajatan, dan biasanya kemudian terjadi perkelahian.

Pemuda kelahiran Ciamis, 22 Juli 1989 ini kemudian mengajak anak muda Pangandaran yang sedang kuliah di berbagai kota untuk membentuk komunitas bernama Sabalad (bahasa Sunda yang berarti sekawan), dideklarasikan pada Januari 2013. Komunitas yang bergerak di ranah literasi ini memelopori dongeng ke sekolah-sekolah dan membuat pojok-pojok baca di Kabupaten Pangandaran.

Dana untuk operasional komunitas didapat dari penghasilan Ai sebagai Pogram Officer Tifa Foundation mengadvokasi hal-hal terkait petani di Pangandaran, seperti mencari saksi untuk judicial review Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan), UU Pangan, dan UU Sistem Budidaya Tanaman di Mahkamah Konstitusi.

Sementara Sabalad sedang menggeliat, ada satu sekolah di kampung itu yang hampir kolaps setelah kepala sekolahnya dipenjara, guru-guru kerap tidak hadir, ditambah lagi bangunannya yang menyedihkan, bekas gudang kelapa. Sekolah itu bernama SMK Bakti Karya Parigi, vokasi di bidang Teknik Komputer Jaringan.

Setahun kemudian Ai diminta mengajar komputer di sekolah ini, yang mirisnya tak punya komputer. Akhirnya Ai merelakan satu laptopnya digunakan 20 siswa. Pada tahun kedua, dia memegang satu lagi mata pelajaran, Bahasa Indonesia.

Melihat kondisi sekolah yang tak kunjung membaik, SMK Bakti Karya Parigi dipindahkan ke lingkungan Sabalad, tanah keluarga Ai yang dihibahpakaikan ke sekolah. Rencana meminta pemerintah menanggung pembangunan fisik sekolah akhirnya membuka fakta baru, ternyata yayasan sekolah itu

bodong, tak memegang SK Menkumham dan tak ada izin operasional. Barulah kemudian dibikin yayasan baru hingga legal.

Ai Nurhidayat ditetapkan sebagai Ketua Yayasan Darma Bakti Karya pada 2016. Kawannya yang lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Irpan Ilmi, menjadi Kepala SMK Bakti Karya Parigi. Manajemen pun dirombak, sekolah diisi dengan guru-guru muda berusia di bawah 25 tahun. Untuk menarik orang bersekolah di sana, dikerahkanlah jaringan komunitas. Konsep Kelas Multikultural mulai diperkenalkan.

Setelah terkumpul nama 25 siswa dari enam provinsi sebagai calon siswa, kampanye dibuat di kitabisa.com untuk membiayai kedatangan mereka ke Pangandaran. Rumah orangtua Ai dijadikan asrama puteri. Ada pula penduduk yang mengizinkan tanah dan rumahnya digunakan sebagai asrama putera. Makan siswa sehari-hari di asrama didapat dari donasi masyarakat melalui www.sbk.sch.id.

Kampung Nusantara

Untuk mendukung program ini, pada 2018 dibentuk juga Kampung Nusantara, yakni lima-lima rumah penduduk disulap sesuai tema satu wilayah di Indonesia. Di Kampung Papua, misalnya, tembok rumah di sana dilukis dengan tema Papua, dan ada anak dari Papua yang tinggal di situ, sehingga penghuni rumah jadi belajar budaya Papua langsung kepada orang Papua.

Di samping tujuannya memperkenalkan budaya daerah, Kampung Nusantara memberi manfaat lain, yakni sebagai rumah singgah para relawan yang mengisi kelas profesi setiap Sabtu, serta homestay bagi tamu di Desa Cintakarya. Posisi Desa Cintakarya relatif strategis, yakni antara Cukang Taneuh (dikenal juga dengan julukan Green Canyon) dan Pantai Pangandaran, dua objek wisata andalan Pangandaran.

Biaya tinggal di Kampung Nusantara terbilang murah, Rp50 ribu per orang per hari. Tambah Rp50 ribu lagi jika mau sepaket dengan makan. Keduanya dibayarkan langsung ke pemilik rumah. Yang dibayarkan ke panitia Kampung Nusantara adalah Rp20 ribu sebagai urunan pembuatan tong sampah serta kegiatan ekologi lain.

Disidang

Rupanya tantangan tak mudah untuk memperkenalkan kayanya keragaman bu-

daya Indonesia. Baru saja program Kelas Multikultural berjalan setahun, muncul isu SARA. Ai dan pengurus yayasan disidang di Aula Setda Kabupaten Pangandaran di hadapan Bupati dan para kepala dinas terkait di tengah teriakan-teriakan takbir di dalam ruangan yang disesaki manusia.

Isu yang diembuskan, menurut Ai, adanya 10 siswa nonmuslim di SMK Bakti Karya Parigi bukti bahwa sekolah ini menjalankan misi kristenisasi, sekolah bisa gratis sebab dapat dana dari gereja, yayasan akan membangun gereja untuk siswa Kristen dan Katolik, bule yang sering datang sebagai relawan tak lain adalah misionaris, bahkan Ai dituding sebagai pastor.

“Kristenisasi apa? Di tempat kami tiap Kamis malam ada pengajian, tiap Jumat ada yasinan. Untuk agama lain ada guru pendampingnya khusus. Tidak dicampur. Seminggu dua kali yang Kristen dan Katolik ke gereja di Pangandaran, sekitar 30 menit dari desa kami. Aman-aman saja,” Ai menjelaskan.

Kepala Desa Cintakarya, juga menjabat Ketua Komite di SMK Bakti Karya Parigi, yang hadir dalam “sidang” mempertanyakan tuduhan tersebut. Dia tak pernah dengar keluhan warga bahwa sekolah itu meresahkan, mengapa tiba-tiba ramai di tingkat Bupati? Bupati akhirnya memubarkan sidang yang tak beralasan tersebut.

Sekarang jumlah siswa SMK Bakti Karya Parigi 80 siswa dari 18 provinsi, mayoritas orang Sunda. Daya tampung asrama 50 orang. Sekarang sedang dibangun asrama putera dua lantai di lahan Sabalad. Siswa nonmuslim baru dari Kristen dan Katolik, belum menerima siswa dari agama lain, dengan alasan belum bisa memfasilitasi pembinaan rohani mereka.

Untuk tahun ajaran ke depan, Ai menginginkan ada anak Tionghoa yang jadi siswa. Pasalnya orang Pangandaran memiliki anggapan negatif tentang orang Tionghoa. Jika ada satu saja siswa Tionghoa, dia akan jadi duta bagi jutaan orang Tionghoa lainnya, dan meruntuhkan asumsi itu.

“Kami bermimpi siswa-siswa ini, dengan jembatan multimedia, mengangkat potensi lokal, mengusung agenda-agenda pencerahan, menjadi jembatan dan pekerja perdamaian. Karena perdamaian tidak bisa dibiarkan begitu saja lalu jadi damai, melainkan harus diusahakan. Ada langkah-langkahnya, metodenya, yakni dari diri sendiri, lingkungan terkecil, hingga luas”●

JANUARI 2018

DUA MOBIL UNTUK PERLANCAR TUGAS RUPBASAN JAKARTA UTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dua mobil kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua mobil yang diserahkan adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan menjadi milik negara. Rencananya, kedua mobil tersebut akan dimanfaatkan untuk mobil operasional Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Utara.

Dua barang rampasan ini berupa unit Toyota Hilux 2,5 G Double Cabin warna hitam tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp149 juta dan 1 unit Avanza 1.3 G warna abu-abu tahun 2011 dengan nilai peroleh Rp59 juta.

Keduanya berasal dari terdakwa yang berbeda. Toyota Hilux dirampas dari terpidana Syahrul Raja Sempurnajaya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan makam umum di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mobil lainnya, Toyota Avanza, dirampas dari terpidana Djoko Susilo dalam tindak pidana ko-

rupsi simulator Surat Izin Mengemudi.

Penyerahan mobil tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK dalam acara Serah Terima Hibah Barang Rampasan yang dihadiri Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Wahiddin dan Koordinator Unit Kerja Labuksi KPK Irene Putrie. Juga turut hadir pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan KPK.

“Ini adalah salah satu upaya KPK mengembalikan aset negara dari terpidana korupsi,” kata Koordinator Unit Kerja Labuksi KPK Irene Putrie di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Januari 2018.

Irene mengatakan, selama ini KPK menghibahkan sejumlah mobil barang rampasan milik terpidana korupsi untuk mobil dinas di pemerintah daerah, kepolisian resor, atau kejaksaan.

Proses penyerahan barang hasil rampasan cukup panjang. Kemenkumham harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian akan ditindaklanjuti ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah Kemenkeu memberi persetujuan, KPK akan memproses serah terima barang rampasan tersebut.

Kedua mobil yang di-

hibahkan, lanjut Irene, secara hukum adalah barang-barang rampasan yang sudah menjadi milik negara, sehingga tidak perlu ada keraguan akan digugat di kemudian hari. Jika ada yang menggugat, maka KPK akan turun tangan mengurus gugatan asal barang rampasan yang telah dihibahkan ke Rupbasan.

Wahiddin mengapresiasi KPK atas pe-

nyerahan barang hasil rampasan tersebut. Ia menyampaikan kesulitan pegawai Rupbasan yang harus menggunakan jasa taksi atau ojek online untuk menghadiri sebuah rapat atau kegiatan lainnya.

“Semoga penyerahan mobil ini dapat memperlancar tugas kami,” kata Wahiddin.

JANUARI 2018

KAJIAN BENEFICIAL OWNERSHIP



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama United States Agency for International Development (USAID), dan juga Ernst and Young Indonesia (EY) sebagai konsultan KPK, serta Sekretariat Negara, mengadakan pertemuan finalisasi kajian *Beneficial Ownership* (BO) di Gedung Merah Putih, KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan, 31 Januari 2018.

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai BO yang sudah dijalankan di empat negara, yaitu Inggris, Singapura, Italia, dan Spanyol. Di empat negara tersebut, regulasi mengenai BO diatur oleh peraturan yang setingkat dengan undang-undang, sedangkan di Indonesia sedang menunggu ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo.

Kajian BO ini juga merekomendasikan kementerian-kementerian teknis seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat peraturan teknis di masing-masing kementerian. Tujuannya untuk

mengumpulkan informasi BO yang terkait dan berada pada sisi regulasi.

BO adalah orang terakhir yang menerima manfaat dari sebuah korporasi. Kriteria BO di Inggris, Singapura, Italia, dan Spanyol dibagi berdasarkan jenis korporasinya, begitupun dengan Indonesia. Inggris menjadi negara pertama yang menggunakan sentralisasi pencatatan BO.

Instansi di setiap negara memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi BO, kecuali Singapura. Di negara tersebut, informasi BO dipegang oleh masing-masing perusahaan, dan wajib diberikan apabila diminta negara.

KPK, pada September 2017, menginisiasi pengajuan Perpres mengenai BO. Rencana pengajuan Perpres ini didesain dalam bentuk kajian yang bekerja sama dengan USAID.

KPK membuat dua tahap dalam pengumpulan informasi BO. Pertama, tahap kementerian yang mengesahkan korporasi atau kementerian teknis. Yang kedua, ialah pengelolaan informasi.

FEBRUARI 2018

PERLUAS KOMITMEN BERANTAS KORUPSI



Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan perluasan daerah ke 10 provinsi setelah dua tahun terakhir melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi & Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Rabu 1 Februari 2018 di gedung Merah Putih KPK. Rapat ini dihadiri Pimpinan KPK Laode M Syarif, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Bidang Penindakan KPK Heru Winarko.

KPK mengundang Sekretaris Daerah dari 10 provinsi serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait. Sepuluh provinsi yang hadir adalah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

KPK akan menindaklanjuti dengan melakukan pemetaan di 10 daerah tersebut guna mendapatkan kondisi yang ada di daerah masing-masing untuk kemudian membuat rencana aksi yang berisi langkah-langkah perbaikan.

FEBRUARI 2018

CEGAH KORUPSI, MAKSIMALKAN PENERIMAAN DAERAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah yang dihadiri 34 pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah (Pemda) ibu kota provinsi yang terdiri dari para kepala dinas terkait penerimaan daerah dan perizinan. Kegiatan kerja sama KPK dan Pemrov DKI Jakarta ini diselenggarakan di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta pada Selasa, 6 Februari 2018.

Selama dua tahun terakhir, KPK mendampingi 34 pemprov dan pemda ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Pemangku kepentingan terkait pengelolaan pendapatan

daerah bisa terjebak dan rawan melakukan korupsi. Jika tidak dikelola dan dipantau dengan baik, pendapatan daerah tidak bisa digunakan dengan optimal untuk membiayai kegiatan atau program pembangunan di daerah.

Setelah rapat koordinasi ini, diharapkan setiap daerah atau seluruh dinas terkait bisa mengoptimalkan penerimaan daerahnya dan berintegrasi dengan saling dukung. KPK juga akan terus melakukan monitoring pada sektor penerimaan yang selama ini belum diperhatikan secara utuh oleh masing-masing daerah di seluruh Indonesia.

FEBRUARI 2018

UPAYA CIPTAKAN ASN BEBAS KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar pertemuan yang bertujuan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan menciptakan pegawai aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

Pertemuan ini membahas tindak lanjut memorandum of understanding (MoU) KPK dan KASN pada 16 November 2017 tentang upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, pertukaran data atau informasi, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagai tindak lanjut, KPK dan KASN akan bekerjasama melaksanakan kegiatan pendidikan antikorupsi. KASN juga akan meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dan Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi bagi internal KASN.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ke-



tua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Ketua KASN Sofian Effendi, Komisioner KASN Wayulo, Komisioner KASN Tasdik Kinanto, dan anggota tim KASN.

FEBRUARI 2018

CEGAH KORUPSI DI PESTA DEMOKRASI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pertemuan bertujuan mencegah politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sekaligus mengingatkan calon kepala daerah serta penjabat (Pj) dan penjabat sementara (Pjs) untuk tidak melakukan praktik ilegal saat kampanye dan meraup suara.

Pertemuan dihadiri Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta empat Pj dan Pjs gubernur di KPK, Jakarta, Senin 26 Februari 2018. Keempatnya adalah Pj Gubernur Papua Soedarmo, Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Pj Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji, serta Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi.

Dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, Tjahjo berjanji akan memfasilitasi KPK bertemu dengan para calon kepala daerah.



KPK juga mengingatkan para penjabat gubernur untuk menertibkan izin pertambangan yang bermasalah.

FEBRUARI 2018

SUPAYA PELAYANAN TENAGA KERJA BEBAS KORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) di gedung Merah Putih KPK pada Rabu 21 Februari 2018. KPK dan BPJS-TK membuat kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) tentang upaya mencegah tindak pidana korupsi dalam proses tata kelola pelayanan BPJS Tenaga Kerja.

Dalam kesepakatan tersebut, KPK akan mendampingi jajaran Direksi BPJS-TK dalam mengelola dana operasional sebesar Rp320 triliun untuk menciptakan tata kelola yang baik. Tercatat, saat ini BPJS-TK memiliki 45 juta peserta dengan jumlah peserta

aktif 26,5 juta. Kerjasama ini adalah bentuk pengawalan dan pengawasan KPK terhadap BPJS-TK agar terhindar dari korupsi dan intervensi.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Penasihat KPK Budi Santoso, Penasihat KPK Sarwono Sutikno, Direktur Utama BPJS-TK Agus Susanto, Direktur Umum BPJS-TK Naufal Majfudz, Direktur Investasi BPJS-TK Amran Nasution, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS-TK Sumarjono, dan Direktur Kepesertaan BPJS-TK E. Ilyas Lubis

FEBRUARI 2018

#NOVELKEMBALI



Sepuluh bulan 11 hari setelah penyerangan terhadapnya, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali ke Tanah Air, Kamis 22 Februari 2018. Selama sembilan bulan terakhir, Novel menjalani pengobatan di Singapura.

Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Novel ke kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang disambut ratusan orang terdiri dari karyawan KPK, alumni pimpinan

KPK, jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil.

Novel Baswedan menyatakan bahwa peristiwa penyerangan tersebut tidak akan membuatnya takut dan menjadi lemah.

“Saya ingin ini juga menjadi penyemangat untuk semua pegawai KPK, aktivis, dan pene-

gak hukum yang dalam tugas memberantas korupsi. Tentu hal ini bisa menularkan semangat yang sama, sehingga semakin berani dalam melaksanakan tugas memberantas korupsi,” ujar Novel

MARET 2018

CEGAH PRAKTIK ILEGAL, MINIMALKAN KERUGIAN NEGARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Kamis, 1 Maret 2018. Rapat ini digelar untuk mengintensifkan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) di Provinsi Papua.

Papua dipilih karena besarnya potensi kekayaan alam dan tingginya potensi penyimpanan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

KPK mencatat peredaran kayu ilegal di Kabupaten Sarmi, Papua sebesar 36.500 meter kubik per tahun. Ada pula potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp13 miliar per tahun. Peredaran kayu ilegal ini membuat adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang hilang untuk Kabupaten Sarmi mencapai Rp4,2 miliar per tahun.



Dalam rapat ini, dilakukan penandatanganan Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua serta penandatanganan Rencana Aksi di Sektor Kehutanan, Sektor Perkebunan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Kelautan & Perikanan oleh pihak-pihak terkait

MARET 2018

BERBAGI PENGALAMAN ATASI KORUPSI KORPORASI



KPK menjadi tuan rumah dalam pertemuan tahunan keenam Economic Crime Agencies network (ECAN) di Para Sanur Beach, Bali, 20-22 Maret 2018. Pertemuan ini dihadiri 15 delegasi badan pemberantasan korupsi berbagai negara, seperti Serious Fraud Office (SFO) Inggris, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Malaysia, dan Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat.

Dipilihnya tema “Pemberantasan Korupsi di Sektor Korporasi” sebab saat ini

pengusaha cenderung menyuap penyelenggara negara untuk melancarkan bisnisnya. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan korporasi mempermudah penegak hukum menjerat korporasi yang terlibat korupsi.

ECAN adalah jaringan resmi lembaga penegak hukum dari berbagai negara yang terlibat dalam menyelidiki dan memerangi kejahatan ekonomi. ECAN berawal dari forum pertemuan informal di antara lembaga penegak hukum sejumlah negara yang kemudian sepakat menjadikannya yang lebih formal.

MARET 2018

BERBAGI PENGETAHUAN PENANGANAN KASUS KORUPSI



Pelatihan ini diikuti aparat penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Provinsi Kalimantan Barat.

Materi yang disampaikan antara lain tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor

pertambangan, perdagangan internasional, kehutanan, dan perkebunan. Titik rawan lain tindak pidana korupsi, yakni dalam pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara, prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah, serta pemahaman audit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 5 Maret 2018.

MARET 2018

BANGUN IKLIM INVESTASI BEBAS KORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha di daerah. Ini adalah lanjutan dari pembentukan KAD di delapan provinsi selama 2017.

Selama Maret-April 2018, KPK membentuk KAD di tujuh provinsi:

Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Aceh.

“KPK tak bisa bergerak sendirian, kami harus berkolaborasi dengan pelaku bisnis dan asosiasinya, juga regulator di daerah. Komitmennya harus sama untuk memberantas korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis, 8 Maret 2018.

Hingga 31 Desember 2017, wasta tercatat sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak, yaitu 184 orang, disusul pejabat eselon

I/II/III 175 orang, anggota DPR/DPRD 144 orang, dan kepala daerah 88 orang.

Modus yang sering dilakukan adalah suap dan gratifikasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara. Lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat, investasi pun terhambat.

MARET 2018

TUKAR PENGALAMAN USAHA BERANTAS KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan rombongan Kedutaan Besar Iran bersama jajaran Parlemenarian Friendship Group Iran awal Maret 2018. Kedatangan rombongan tersebut hendak mendengar pengalaman KPK dalam memberantas korupsi serta mempelajari sistem kerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertemuan tersebut membahas banyak hal, dari me-

kanisme pemilihan lima pimpinan hingga independensi KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Secara rinci, perwakilan dari parlemen Iran pun menanyakan bagaimana langkah awal KPK mendeteksi korupsi, dan peran dan fungsi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Chairman of the Parliamentarian Friendship Group Iran, Mahmud Sadeghi, mengatakan pihaknya akan segera membuat komite yang bisa menekankan pentingnya transparansi di parlemen negaranya.



MARET 2018

BANGUN SISTEM PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa bersama 10 perwakilan Sekretariat Daerah (Sekda), Senin, 5 Maret 2018.

Sepuluh daerah yang dipilih karena memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar di seluruh Indonesia itu adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan serta Sekda dari Kota Semarang, Bandung,

Medan, Surabaya, dan Makassar.

Pemerintah Daerah akan menyusun dan menetapkan rencana umum pengadaan serta mengumumkan lewat aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) atau di situs masing-masing daerah. Setiap anggaran yang direncanakan untuk tahun berikutnya harus sudah selesai dan dimuat dalam SIRUP di tahun berjalan. Setelah SIRUP diunggah, Pemerintah Daerah bisa melihat harga pasar dari penyedia lewat e-Catalog dan membelinya lewat e-purchasing

MARET 2018

TERUS CARI MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar KPK Mendengar dengan tema "Demi dan Untuk Indonesia", Senin, 12 Maret 2018. Acara ini dimaksudkan untuk mendengarkan masukan guna meningkatkan kinerja KPK.

Pimpinan lembaga yang hadir dan ikut memberi masukan adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerjaja Djanegara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat,

Kepala Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Ketua Ombudsman Republik (ORI) Amzulian Rifai, serta perwakilan Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia.

Ketua KPK Agus Rahardjo menekankan

perlu segera dibuat peraturan mengenai konflik kepentingan serta membangun sinergi untuk dapat meningkatkan skor indeks persepsi korupsi (corruption perception index - CPI) Indonesia. Hampir seluruh pembicara mengemukakan bahwa usaha pencegahan korupsi yang dilakukan KPK harus ditingkatkan lagi

MARET 2018

SINERGI MAKSIMALKAN ASET BARANG RAMPASAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri bersinergi dalam penyerahan aset barang rampasan dari KPK ke kepolisian pada Kamis, 8 Maret 2018, di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Salah satu barang rampasan negara yang diserahkan berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Muhammad Nazaruddin, yaitu sebidang tanah seluas 153 meter persegi beserta bangunan di atasnya seluas 600 meter persegi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai Rp12 miliar.

Barang lain yang diserahkan berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Fuad Amin, yaitu satu unit kendaraan Toyota Kijang Innova V XW43 bernomor polisi M 1299 GC tahun perolehan 2010 senilai Rp257 juta.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan pelacakan aset KPK di-



lakukan pada saat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses ini bukan penyerahan aset dari KPK kepada Polri, melainkan pengembalian aset tetap kepada negara, melalui institusi Polri

MARET 2018

PERKUAT FUNGSI PENINDAKAN KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 13 penyidik muda yang terdiri dari sembilan dari internal dan empat dari kepolisian, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 13 Maret 2018. Dengan penambahan 13 penyidik, saat ini KPK memiliki 93 penyidik.

Upacara pelantikan penyidik muda yang dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, tiga penasihat KPK: Sarwono Sutikno, Budi Santoso, dan Mo-

hammad Tsani Anafari, Sekretaris Jendral KPK R. Bimo Gunung Abdul Kadir, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan jajaran struktural KPK.

Dalam upacara tersebut, para penyidik muda menyatakan sumpahnya atas nama agama untuk mengabdikan dan setia demi kepentingan masyarakat. Setelah disumpah, penyidik muda tersebut menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen untuk menjalankan pekerjaan sebagai penyidik yang berintegritas

APRIL 2018

KPK HIBAHKAN BARANG RAMPASAN SENILAI RP17 MILIAR



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti rampasan dari Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan, Madura terpidana suap jual beli gas alam di Bangkalan Madura. Serah terima ini dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Surabaya pada Jumat, 13 April 2018.

Barang rampasan yang diserahkan Pimpinan KPK Basaria Panjatan kepada Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Wahidin bernilai total hampir Rp17miliar, terdiri

dari tanah dan tiga kendaraan. Tanah seluas 18.466 m2 bernilai Rp16miliar di Kelurahan Mlajah diserahkan kepada BPN Bangkalan Madura.

Tiga kendaraan yang diserahkan adalah Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT Tahun 2012 senilai hampir Rp93 juta untuk kendaraan operasional Kepala Lapas Sukamiskin, Toyota Kijang Innova V XS43 DSL Tahun 2012 senilai hampir Rp164 juta untuk kendaraan operasional Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, dan Honda Mobilio DD4 Tahun 2014 senilai Rp135 juta untuk kendaraan operasional Kepala Rupbasan Surabaya.

APRIL 2018

PELANTIKAN PEJABAT DIHARAPKAN PICU SEMANGAT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memiliki Deputy Bidang Penindakan dan Direktur Penuntutan pada Jumat 6 April 2018. Ketua KPK Agus Rahardjo melantik Brigadir Jenderal Polisi Firli sebagai Deputy Penindakan, dan Supardi sebagai Direktur Penuntutan.

Firli yang sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat, menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko yang menerima tugas baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Supardi adalah jaksa penuntut umum yang dipekerjakan di KPK. Dia sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas



Direktur Penuntutan.

Upacara pelantikan ini dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, tiga penasihat KPK: Sarwono Sutikno, Budi Santoso, dan Mo-

hammad Tsani Annafari; Sekretaris Jendral KPK R. Bimo Gunung Abdul Kadir; Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman; dan jajaran struktural KPK.

APRIL 2018

DEMI PEMIMPIN BEBAS KORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian menggelar dua kegiatan sekaligus dalam program Pilkada Berintegritas di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis, 5 April 2018.

Kegiatan pertama adalah pembekalan untuk para pasangan calon kepala daerah yang

bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak, Juni 2018. Kedua, pengumuman Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

Pembekalan diperlukan karena KPK mencatat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Selain itu,

MEI 2018

PERKUAT PEMAHAMAN KORUPSI DALAM KONSEP KONSTITUSI



Tahun ini merupakan kali ketiga Festival Konstitusi dan Antikorupsi diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Festival ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Bertempat di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa, 15 Mei 2018, rangkaian acaranya dibuka oleh Ketua KPK

Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, Rektor USU Runtung Sitepu, serta mewakili MPR hadir Ketua Badan Pengkajian Bambang Sadono. Empat narasumber tersebut menandatangani dan mendeklarasikan komitmen bersama antikorupsi.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi terdiri dari talkshow, pameran, focus group discussion (FGD), dan jumpa pers bersama di Gedung MPR oleh Ketua KPK, Ketua MK, Ketua MPR dan Rektor USU.

MEI 2018

DAHSYATNYA DAYA RUSAK KORUPSI KE LINGKUNGAN



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak lembaga swadaya masyarakat (LSM) berpartisipasi dalam menjaga, menghitung kerugian negara akibat kerusakan hutan, dan membuat laporan demi memberantas korupsi di sektor sumber daya alam.

Kegiatan yang bertempat di gedung Merah Putih KPK, 30 & 31 Mei 2018, itu terdiri dari workshop cara menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan.

Dosen Institut Pertanian Bogor dan ahli

penghitungan kerugian dampak lingkungan Basuki Wasis mengatakan kerusakan lingkungan menyebabkan kerugian lintas ekosistem negara. Kerusakan hutan akibat tambang, misalnya, dapat menyebabkan kerugian negara Rp12 triliun dan kerugian akibat tambang emas ilegal mencapai Rp35 triliun. Jika dihitung, kerugian sosial ekonomi masyarakat karena tumpahan minyak bisa mencapai Rp303 miliar.

MEI 2018

KPK JALIN KERJA SAMA DENGAN ICAC MAURITIUS



Laundering in Africa, Senin, 7 Mei 2018 di Mauritius.

Konferensi tersebut dihadiri lembaga antikorupsi dan Financial Intelligence Unit (FIUs) dari sejumlah negara Afrika dan perwakilan African Development Bank. KPK hadir sebagai pembicara atas undangan Independent Commission Against Corruption - ICAC Republik Mauritius.

Selain menjadi narasumber, kehadiran pimpinan KPK untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang berbagi pengetahuan perihal pemberantasan korupsi dan pencucian uang antara KPK dan ICAC Mauritius. Penandatanganan dilakukan oleh Laode M. Syarif dan pihak ICAC Mauritius diwakili oleh DR. Navin Beekarry.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menghadiri Regional Conference on Effectiveness of Anti-Corruption Agencies and Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Money

MEI 2018

BERSIHKAN INDONESIA DARI KORUPSI LEWAT LAGU

Perlawanan terhadap korupsi bisa dilakukan dengan segala cara. Sejumlah musisi berkolaborasi membuat album bertajuk "KPK Kompilasi Perangi Korupsi" sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Album berisi lagu-lagu milik



OM PMR, Navicula, Marjinal, Iksan Skuter, My Stereo Ill, Simponi, Sisir Tanah, dan Tapak Rasta itu bercerita tentang keprihatinan terhadap maraknya praktik korupsi di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagas peluncuran album tersebut dalam sebuah Mini Konser pada Jumat, 4 Mei 2018 di depan gedung Merah Putih KPK. Peluncurannya ditandai dengan penyerahan 10 keping CD album Kompilasi Perangi Korupsi dari pen-

gagas album KPK Mikail Israfil kepada KPK yang diwakili Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut Situmorang juga tampil di panggung berkolaborasi dengan Marjinal, mengisi dengan alunan saxophone di lagu Hukum Rimba. Album Kompilasi Perangi Korupsi dibagikan gratis kepada komunitas-komunitas yang datang sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi.

MEI 2018

PEMBERANTASAN KORUPSI BUTUH PERAN SELURUH ELEMEN

KPK mengundang alumni pimpinan dan pejabat struktural KPK yang tergabung dalam Forum Komunikasi Alumni KPK dalam kegiatan KPK Mendengar dan Peluncuran Buku 14 tahun Perjalanan KPK pada Rabu, 23 Mei 2018. Acara yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK itu dihadiri lima pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif.

Rangkaian acara dimulai dengan sesi KPK Mendengar. Lima pimpinan KPK mendengar saran dan kritik dari alumni pimpinan dan pejabat struktural KPK.

Kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran buku 14 Tahun KPK dan Diskusi yang turut mengundang karyawan KPK

dan media. Buku 14 Tahun KPK berjudul Yang Tercecer di Kamar Gelap ini berisi 70 foto perjalanan KPK yang belum pernah dipublikasikan, karya pewarta foto dan tim dokumentasi KPK.



TOLAK PELEMAHAN, KPK SURATI PRESIDEN

JUNI 2018



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta agar tindak pidana korupsi tetap diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa rencana pengesahan RKUHP tak akan berakibat merugikan

upaya pemberantasan korupsi walau masih terdapat aturan yang beresiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Terkait hal tersebut, KPK telah mengirimkan lima surat kepada Presiden, Ketua Panitia Kerja RKUHP Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut Syarif, terdapat sejumlah persoalan yang dianggap beresiko bagi KPK maupun pemberantasan korupsi di kemudian hari, salah satunya kewenangan kelembagaan KPK. Banyak hukuman yang justru meringankan masa tahanan dan tidak mengatur denda pengganti bagi koruptor.

Dengan hadirnya delik Tipikor dalam KUHP akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tak ada konsep dan parameter yang jelas. Pengaturan delik korupsi secara keseluruhan di UU Tipikor saat ini, lanjutnya, dinilai lebih efektif.

JUNI 2018

LAGI, KPK DAPAT OPINI WTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Peringkat Opini WTP ini sudah diraih KPK sejak tahun 2006.

Tahun ini BPK memberikan Opini WTP terhadap 80 laporan keuangan kementerian/lembaga (91 persen), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak enam laporan keuangan kementerian/lembaga sedangkan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua laporan kementerian lembaga.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pemeriksaan atas LKPP ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ia meminta pimpinan lembaga/kementerian untuk dapat mempertahankan prestasi WTP di lingkungannya masing-masing.

sing.

Dalam acara tersebut, Pimpinan KPK Saut Situmorang didampingi oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Isnaini dan Plt. Direktur Pengawas Internal Djoni Suratno beserta fungsional pendamping. Djoni menyampaikan, pencapaian opini WTP tahun 2017 melalui proses perjuangan yang tidak mudah di internal KPK.

"Kami masih menghadapi tiga permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu kurangnya SDM yang memahami aturan pengadaan, pengelolaan persediaan barang rampasan, dan piutang uang pengganti," jelas Djoni.



JUNI 2018

SELAMA 7 JAM, KPK TERIMA DUKUNGAN 48 RIBU MASYARAKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rangka mendukung KPK lewat sebuah petisi berjudul #KPKDalamBahaya, Tarik Semua Aturan Korupsi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (05/06).

Ketua KPK Agus Rahardjo menemui perwakilan masyarakat sipil dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI-I), Indonesian Legal Roundtable, dan Pemuda Muhammadiyah. Selain perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Mantan Pimpinan KPK Periode 2007-2011 Mochammad Jasin juga hadir untuk mendukung KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil mengajak ma-



syarakat menandatangani petisi yang bisa diakses di situs change.org agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menarik semua aturan mengenai tindak pidana korupsi dari RKUHP yang disahkan pada 17 Agustus 2018.

Menurut anggota koalisi, masuknya pasal korupsi dalam RKUHP, dapat mengancam eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian dapat menangani kasus korupsi, dan pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Dalam 7 jam, sudah 48 ribu masyarakat Indonesia ikut menandatangani petisi yang kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

JULI 2018

SUPAYA KUALITAS POLITIK INDONESIA MENINGKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi "Politisi dan Kontestasi" sekaligus temu komunitas cerdas berintegritas di Gedung KPK, Senin, 13 Juli 2018. Komunitas yang hadir merupakan kumpulan alumni kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dari kelas siswa, mahasiswa, politisi, serta perwakilan CSO anti-korupsi yang diadakan KPK sejak 2016.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif, Direktur Eksekutif Perkumpulan



untuk Pemilu dan Demokrasi (Perlu-dem) Titi Anggraini, dan Peneliti Senior P2P LIPI Syamsudin Haris.

Dalam acara tersebut, Syarif mengemukakan, korupsi sumber daya alam terjadi karena penyalahgunaan wewenang saat pengambilan kebijakan di sektor tersebut. Kiprah politik seseorang, lanjut dia, sangat mungkin mempengaruhi berbagai hal yang seharusnya menjadi ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

JULI 2018

SINERGI MAKSIMALKAN PENGGUNAAN ASET NEGARA



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat unit kendaraan bermotor dan satu rumah yang merupakan barang rampasan perkara korupsi kepada Kejaksaan Agung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa, 24 Juli 2018.

Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyerahkan langsung aset-aset tersebut kepada Jaksa Agung HM Prasetyo.

Aset yang diserahkan adalah hasil rampasan dari terpidana kasus tindak pidana korupsi yang telah inkraht atau telah memiliki hukum tetap dan telah menjadi milik negara. Aset-aset dengan total nilai Rp3,5 miliar tersebut berasal dari perkara Fuad Amin, Djoko Susilo, dan M. Akil Mochtar.

Barang rampasan dari terpidana Fuad Amin yang telah menjadi aset negara berupa Toyota Fortuner, Toyota Kijang Innova, dan Hyundai H1 dengan total nilai Rp470 juta. Barang rampasan dari Djoko Susilo adalah Isuzu Elf senilai Rp28 juta. Dari terpidana Akil Mochtar, aset yang dirampas adalah tanah dan bangunan di Jalan Pancoran Indah 3 Nomor 8, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 140 meter persegi dan luas bangunan 172 meter persegi senilai Rp3 miliar.

JULI 2018

MAKSIMALKAN KOLABORASI CEGAH KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah melakukan kolaborasi mencegah korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Stranas PK dijalankan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan. Dasar kolaborasi ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan kebijakan ini akan memperkuat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tujuan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi agar upaya pencegahan

korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini adalah bentuk dari inovasi kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi yang lebih berdampak.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kolaborasi ini akan mengarahkan fokus pada prioritas pembangunan nasional, khususnya sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.



JULI 2018

KOLABORASI PERBAIKI SISTEM PERADILAN



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018. Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan meningkatkan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada lima poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut, yakni melancarkan pertukaran data

dan informasi, mencegah tindak pidana korupsi, memberikan pelatihan dan sosialisasi, kajian dan penelitian, serta narasumber dan tenaga ahli.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, dalam kurun tahun 2004 sampai 2018, tercatat sudah 739 pejabat negara ditangkap KPK, 17 di antaranya adalah hakim. Kondisi ini, kata dia, sangat miris karena peradilan merupakan tempat terakhir masyarakat mencari keadilan.

JULI 2018

KPK SETORKAN RP17 MILIAR KE KAS NEGARA

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan Lelang Barang Rampasan Dengan Perantaraan Pejabat Lelang KPKNL Jakarta III, Rabu, 25 Juli 2018 di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan.

tetapkan sebelumnya (24 Juli 2018, pukul 23:30). Ada beberapa peserta yang mengikuti lelang lebih dari satu barang.

Sebanyak 14 lot laku terjual, sedangkan sisanya disimpan kembali untuk dilakukan lelang ulang atau jika ada instansi yang meminta aset tersebut maka akan diberikan penyerahan PSP (Pengalihan Status Penggunaan) bagi kementerian terkait atau hibah barang rampasan bagi pemerintah provinsi (pemprov) yang meminta.

Hingga acara lelang selesai, diketahui perolehan sementara uang yang masuk untuk kas negara dari penghitungan DJKN ialah lebih dari Rp17 miliar, termasuk bea lelang sebesar tiga persen yang kemudian akan ditanggung pembeli.



AGUSTUS 2018

KPK PERKUAT KOMITMEN INTERNASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan delegasi mewakili Indonesia ke pertemuan International Anti-Corruption Academy (IACA) Assembly of Parties di Wina, Austria pada 27-28 September 2018.

Indonesia adalah satu dari 75 negara anggota IACA. Keikutsertaan KPK dalam forum ini adalah salah satu upaya memperkuat komitmen internasional dalam bidang penguatan antikorupsi. IACA adalah akademi internasional



yang bergerak mengembangkan kapasitas personel yang bergerak di bidang anti-korupsi.

Pada pertemuan Assembly of Parties ini, delegasi Indonesia yang terdiri atas KPK dan Kedutaan Besar RI di Wina menyampaikan pandangan bahwa penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang terdiri dari aspek pencegahan dan pemberantasan. Bentuk pencegahan adalah pendidikan antikorupsi.

AGUSTUS 2018

TERUS BERKARYA LAWAN KORUPSI

Tahun ini untuk ketiga kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Festival Lagu Suara Antikorupsi (SAKSI). SAKSI adalah kampanye antikorupsi dengan mengundang masyarakat membuat lagu, untuk kemudian dibuatkan album bagi lagu-lagu terpilih. Tujuannya adalah melibatkan masyarakat umum dalam gerakan antikorupsi melalui karya musik.

Pada tahun ketiga ini, KPK mengemas Festival Lagu SAKSI dalam bentuk baru. KPK tidak menggelar audisi regional di beberapa kota, melainkan langsung melalui proses

pengumpulan karya ke kanalkpk. Hasil penjurian di babak penyisihan untuk memilih 9 karya terbaik yang kemudian dihadirkan ke Jakarta dalam Final Festival Lagu SAKSI sekaligus malam penghargaan bagi juara nasional.

Sebagai pre-event dilaksanakan program Klinik Musik Antikorupsi di 9 kota Besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Medan, Balikpapan, dan Cirebon. Program ini berupa diskusi, belajar membuat lirik lagu dengan pesan antikorupsi dan jamming session dengan narasumber dan peserta.



AGUSTUS 2018

BERTUKAR PENGALAMAN, KUATKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan tiga lembaga internasional untuk memperkuat kerja pemberantasan korupsi, yakni Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan, Anti Bribery Committee of Japan (ABC-J) Jepang, dan Ministry of Justice Investigation Bureau Taiwan. Pertukaran pengalaman antara ACRC dan KPK berlangsung melalui diskusi antara pegawai KPK dan ACRC di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam diskusi ini, Director of Training Planning dari Anti-corruption Training Institute (ACTI) Chae Soo Lim mengenalkan lembaga yang merupakan bagian dari ACRC. ACTI adalah lembaga pelatihan untuk masyarakat dan penyelenggara Negara agar memiliki integritas yang lebih baik dan me-



nanamkan karakter antikorupsi. Ini adalah salah satu cara Korea Selatan untuk mencegah korupsi dengan memberikan mereka pengetahuan dan pelatihan.

Lim berbagi cara ACTI memberikan pelatihan yang menyenangkan kepada masyarakat dan penyelenggara negara lewat konser musik, pertunjukan, atau diskusi menarik bersama tokoh masyarakat yang inspiratif.

ACRC membuat sebuah pedoman pencegahan korupsi di sektor swasta bernama Anti-corruption Guidelines for Companies yang harus diterapkan di seluruh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Peraturan tersebut terintegrasi dengan aturan-aturan lain, seperti kewajiban mengikuti training integritas dan mengikuti aturan gratifikasi

AGUSTUS 2018

DEMI PENGELOLAAN KEUANGAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan topik "Menuju Interoperabili-

tas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah" pada Rabu, 8 Agustus 2018. Diskusi ini membahas permasalahan

yang muncul dalam maraknya pengembangan aplikasi sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat dan daerah berlomba menciptakan sistem yang mampu mengelola keuangan lebih transparan, efektif, dan efisien melalui sistem tersebut.

Ada perwakilan tujuh pemerintah daerah yang menghadiri diskusi tersebut, yakni Pemrov Riau, Pemrov Jawa Tengah, Pemkot Surabaya, Pemkot Bandung, Pemkab Batang, Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Purworejo. Arahan diberikan Pimpinan KPK

Basaria Panjaitan, Alexander Marwata serta Penasihat Tsani Annafari.

Koordinator Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda mengatakan saat ini sistem informasi digunakan untuk pengelolaan anggaran daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membangun Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIMDA) Keuangan yang telah dipakai oleh 392 daerah. Banyaknya aplikasi keuangan di berbagai lembaga ini, masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi

SEPTEMBER 2018

JELAJAH NEGERI, BANGUN ANTIKORUPSI

Sebuah bus berwarna putih biru berlogo KPK menjalankan tugasnya mengunjungi masyarakat di sebelas kabupaten/kota melalui program Jelajah Bus Antikorupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang meluncurkan Jelajah Bus Antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 24 Sep-

tember 2018.

Bus ini menyapa masyarakat Indonesia melalui program penguatan kampanye anti-korupsi "Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi" pada 24 September hingga 31 Oktober 2018. Kabupaten/kota yang akan dikunjungi adalah Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Bandung.

Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi sekaligus bentuk konkret interaksi KPK dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan cara melawannya



SEPTEMBER 2018

KEKUATAN BARU PERKUAT PEMBERANTASAN KORUPSI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo resmi melantik tiga pejabat struktural baru di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 20 September 2018.

Tiga pejabat itu ialah Komisaris Besar Polisi RZ Panca Putra Simanjuntak sebagai Direktur Penyidikan di Kedepuitan Penindakan KPK, Arif Waluyo sebagai Kepala Biro Perencanaan & Keuangan di Sekretariat Jenderal KPK, dan Eko Marjono sebagai Direktur Monitor pada Kedepuitan INDA.

Direktur Penyidikan KPK yang baru, Kombes RZ Panca Putra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan menggantikan posisi Brigjen Aris Budiman. Sedangkan Direktur Monitor KPK Eko Marjono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat KPK.



SEPTEMBER 2018

KOMITMEN TERUS PERBAIKI KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penghargaan dalam kegiatan Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan pada Kamis, 20 September 2018.

Penghargaan ini diperoleh karena KPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hary Budiarto.

Selain KPK, ada 13 lembaga negara lain, antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), 7 lembaga tinggi negara seperti

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA) yang menerima penghargaan yang sama.

Selain itu, 11 Kementerian, 8 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kota, dan 38 pemerintah kabupaten juga menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut.



SEPTEMBER 2018

KERJA SAMA DEMI KESEJAHTERAAN DUA NEGARA

KPK melakukan kunjungan bilateral ke Government Inspectorate of Vietnam (GIV), Hanoi, Vietnam, pada 24-26 September 2018. Delegasi KPK yang dipimpin Wakil Ketua KPK Saut Situmorang diterima Deputi Jenderal Inspektur Nguyen Van Thanh di kantor GIV. Pertemuan ini antara lain membahas strategi pencegahan yang dilakukan KPK, implementasi review UNCAC yang sudah dilakukan oleh Indonesia, dan berbagi pengalaman mengenai program "Saya, Perempuan Anti Korupsi" (SPAK).

Dua rekomendasi dihasilkan dalam pertemuan ini. Pertama, kedua pihak sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama lebih aktif di masa mendatang. Kedua, semua bersepakat untuk saling mendukung, baik di forum bilateral maupun multilateral. Saat ini Vietnam tengah melakukan review UNCAC



dan meminta Indonesia memberikan penilaian yang objektif atas upaya yang sudah dilakukan hingga saat ini.

Perjanjian kerja sama KPK dan GIV pertama kali ditandatangani pada tahun 2006, untuk membangun kapasitas kedua lembaga dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sesuai tugas dan kewenangannya.

OKTOBER 2018

SELAMATKAN SUMBER DAYA ALAM, KPK EVALUASI GNP-SDA

Lagu Indonesia Raya dengan tiga stanza membuka diskusi mengenai evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin, 1 Oktober 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, Kepala Dinas dan Sekertaris Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk berdiskusi mengenai hasil evaluasi rencana aksi GNP-SDA. Dari sini kemudian memetakan permasalahan dan menyusun langkah-langkah akselerasi GNP-SDA bersama Kementerian, Lembaga, Pemda dan Koalisi Masyarakat Sipil.

Delapan tahun lalu, KPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan dalam rangka perbaikan sistem perencanaan kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari pemerintah, 12 Kementerian dan Lembaga Negara menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan



Hutan Indonesia pada 11 Maret 2013.

Nota Kesepakatan tersebut lalu diperbaharui dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) pada 19 Maret 2015 di Istana Negara dengan melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga disektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan.

OKTOBER 2018

BENTUK KESADARAN ANTISIPASI CEGAH KORUPSI



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menerima kedatangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wagub Sumsel Mawardi Yahya, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi ke Gedung Merah Putih KPK, Senin, 1 Oktober 2018.

Pertemuan ini merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang telah menjerat banyak kepala daerah. Agus mengimbau agar setiap kepala daerah berkoordinasi dengan tim pencegahan KPK yang telah

berada di semua Provinsi di Indonesia. Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK (Korsupgah) akan membantu setiap daerah melakukan rencana aksi demi perbaikan sistem di daerah.

Kemudian Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus zero tolerance dalam menghadapi korupsi. Sebelumnya, Tjahjo juga membawa sembilan pasang Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 5 September 2018 sebagai langkah pencegahan korupsi.

Sembilan gubernur dan wakil gubernur tersebut adalah Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Utara), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jawa Tengah), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalimantan Barat), Viktor Bungtilu Laiskodat - Josef Nae Soi (Nusa Tenggara Timur), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua), serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat)•

NOVEMBER 2018

KPK-MACC TERUS PERKUAT KERJA SAMA BERANTAS KORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi bersama Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC). Pada Senin, 5 November 2018, Komisioner MACC kembali mengunjungi KPK untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dibangun KPK adalah mendeklarasikan harta kekayaan pejabat negara secara transparan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). KPK bahkan mempermudah para wajib lapor agar bisa melaporkan harta kekayaannya secara online lewat e-LHKPN•

NOVEMBER 2018

KPK TERIMA PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penghargaan lembaga non-struktural menuju informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Penghargaan tersebut diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah di Kantor Wakil Presiden, Senin, 5 November 2018.

Selain KPK, penghargaan ini juga diberikan kepada 39 kementerian dan lembaga serta sembilan partai politik yang dianggap sudah cukup terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Pemeringkatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi



bagi badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.•

NOVEMBER 2018

KPK, KEMENDAGRI, DAN KEMENPAN-RB SEPAKAT TINGKATKAN INDEPENDENSI PENGAWAS DAERAH



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 12 penyidik muda di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.

Dalam upacara ini, 12 penyidik muda menyatakan sumpahnya untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat demi kepentingan negara. Mereka juga menandatangani pakta integritas yang disaksikan Di-

rektur Penyidikan KPK R.Z Panca Putra dan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi.

Dari 161 peserta seleksi yang berasal dari Bareskrim dan Polda di seluruh Indonesia, hanya 12 orang yang lolos menjadi penyidik muda. Kedua belas penyidik muda ini sejak Juli 2018 telah mengikuti rangkaian proses seleksi, terdiri dari tes potensi akademik, psikologi, fisik, dan tes wawancara•

NOVEMBER 2018

KPK BANGUN INTEGRITAS LEWAT PESANTREN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima puluhan kader Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka menanamkan nilai integritas lewat pengurus-pengurus pesantren di Pusat Edukasi Anti-Korupsi, Gedung C1 KPK, Jakarta, Rabu dan Kamis, 21-22 November 2018.

Pelatihan ini adalah rangkaian kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Wawasan

Keulamaan (PPWK) yang dibuat Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tahun ini, ada 38 peserta yang merupakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNu) dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

NOVEMBER 2018

GEDUNG LAMA KPK RESMI JADI PUSAT EDUKASI ANTIKORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di gedung KPK C1, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

Gedung ACLC dulunya adalah kantor Bank Pangan Sejahtera yang diberikan pada KPK saat krisis moneter ditahun 1988 – 1989.

Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC dibentuk pada 2011 atas kerja sama KPK dengan lembaga donor Jerman *Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit* (GIZ). Ia



lahir atas komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang antikorupsi.

NOVEMBER 2018

KPK INGATKAN KOMITMEN PELAKSANAAN REKOMENDASI UNCAC

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membahas pelaksanaan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pembahasan ini dilakukan dengan menggelar Diskusi Publik Paparan Hasil Review Putaran I dan II UNCAC, pada Selasa, 27 November 2018.

Peninjauan UNCAC putaran II menghasilkan 21 rekomendasi untuk Indonesia. Dari jumlah itu, 14 di antaranya adalah tentang

pengecahan korupsi, tujuh lainnya tentang pemulihan aset. Salah satu poin rekomendasinya adalah memastikan independensi lembaga antikorupsi.

Di peninjauan putaran II ini, Indonesia ditinjau oleh Yaman dan Ghana. Peninjauan putaran I (tahun 2011) dilakukan oleh Inggris dan Uzbekistan yang menghasilkan 32 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

NOVEMBER 2018

KPK DORONG INSTANSI PEMERINTAH BUAT REGULASI LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang 27 perwakilan dari kementerian dan lembaga negara dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Acara tersebut diselenggarakan di Pusat Edukasi Antikorupsi, Gedung KPK C1, Jakarta, 27-29 November 2018.

Kegiatan ini merupakan langkah KPK mendorong kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di



tahun 2019. Komitmen dari setiap Kementerian dan Lembaga negara sangat penting agar fungsi LHKPN sebagai alat pengawas bisa berjalan dengan baik.

NOVEMBER 2018

KONSER FINAL FESTIVAL SUARA ANTI KORUPSI (SAKSI) 2018

Akar, grup band asal Medan, dinyatakan sebagai pemenang Festival Suara Antikorupsi (SAKSI) 2018 menyisihkan Warna Music dari Surabaya (juara 2) dan 3 Meriam dari Yogyakarta (juara 3). Inoe Band dari Tangerang terpilih sebagai juara favorit.

Festival diadakan di Pasar Festival, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 30 November 2018 bersamaan dengan peluncuran album kompilasi Suara Antikorupsi 2018. Album tersebut berisi 10 lagu, terdiri dari sembilan lagu milik sembilan finalis, dan satu lagu dari band Navicula berjudul *Biarlah Malaikat*.



NOVEMBER 2018

TAMBAH AMUNISI, KPK LANTIK 12 PENYIDIK MUDA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 12 penyidik muda di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.

Dalam upacara ini, 12 penyidik muda menyatakan sumpahnya untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat demi kepentingan negara. Mereka juga menandatangani pakta integritas yang disaksikan Di-

rektur Penyidikan KPK R.Z Panca Putra dan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi.

Dari 161 peserta seleksi yang berasal dari Bareskrim dan Polda di seluruh Indonesia, hanya 12 orang yang lolos menjadi penyidik muda. Kedua belas penyidik muda ini sejak Juli 2018 telah mengikuti rangkaian proses seleksi, terdiri dari tes potensi akademik, psikologi, fisik, dan tes wawancara.

DESEMBER 2018

CAHAYA DI UJUNG LORONG BAGI KORPORASI DAN PENEGAK HUKUM

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal pada 11 Desember 2018 di Hotel The Park Lane, Jakarta Selatan.

Peluncuran ini mengundang Yunus Hussein pakar TPPU, Celin Maunder dari Department of Home Affairs Australia, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia Kristian Sihar Manul-

lang, Kepala Divisi Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy, dan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IA Otoritas Jasa Keuangan Ida Bagus Aditya Jayaantara.

Tujuannya untuk mendiskusikan motivasi sektor swasta untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan di pasar modal. Didiskusikan pula bagaimana layaknya penegak hukum menghadapi kasus TPPU asal korupsi, strategi penanganan perkaranya, serta pemulihan aset TPPU di pasar modal.

DESEMBER 2018

PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK GENERASI ANTIKORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi yang diadakan di Hotel Kartika Chandra, Selasa, 11 Desember 2018. Rakornas ini mempertemukan seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan di bidang pendidikan untuk bisa berkomitmen sekaligus berdiskusi mengenai hal-hal strategis yang bisa dikerjakan ber-

sama.

Dalam pertemuan itu, KPK memanggil beberapa ahli dari dunia pendidikan untuk memberikan pandangan mengenai pendidikan karakter untuk membangun generasi antikorupsi. Sebagai narasumber, hadir Pegiat Pendidikan Najeela Shihab, Tokoh Pendidikan Indonesia Arief Rachman, Pimpinan KPK Jilid III Busyro Muqoddas.

DESEMBER 2018

KAMPANYEKAN ANTIKORUPSI LEWAT FILM, KPK ANUGERAHI PEMENANG ACFFEST 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada tujuh peserta Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2018.

Mereka adalah para pemenang ide cerita film pendek terbaik yang karyanya difilmkan. Selain memberikan penghargaan dan mengumumkan karya terbaik, KPK juga memutar tujuh film tersebut dalam *premier movie* di Gedung sinema CGV Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2018.

Tujuh film pendek berdurasi tidak lebih dari 15 menit tersebut adalah *Blessed* (Candra Aditya, Jakarta); *One Second* (Jody Surendra, Jakarta); *Sekeping Tanggung Jawab* (Fitto E.

Arunfieldo, Bogor); *Subur Itu Jujur* (Gelora Yudaswara, Ponorogo); *Kurang 2 Ons* (Harris Supiandi, Pontianak); *Baskara Ke Wukir* (Latifah Fauziyah R, Tegal); dan *Jimpitan* (Wiwid Septiyandi, Yogyakarta).



DESEMBER 2018

KPK DORONG KOMITMEN DAN RENCANA AKSI BERSAMA WUJUDKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menandatangani komitmen implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Penandatanganan komitmen ini di-

laksanakan pada rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi di Jakarta pada 11-12 Desember 2018.

Rakornas Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong diimplementasikannya pendidikan antikorupsi di setiap jenjang. Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan di setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

DESEMBER 2018

MELACAK ARTI KORUPSI, MENYIMAK IMPLIKASI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan sarasehan pustaka sekaligus peluncuran buku *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* karya B. Herry Priyono di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 13 Desember 2018.

Selain sang penulis, sarasehan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Hakim

Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, dan cendekiawan Komarudin Hidayat sebagai narasumber.

Buku ini merupakan upaya untuk memahami kompleksitas korupsi dengan pendekatan multidisiplin. Dengan pendekatan dan perspektif yang beragam mengenai korupsi, buku ini akan memberi fondasi baru dalam memahami korupsi, sekaligus menjadi “darah segar” gerakan antikorupsi di Indonesia.

DESEMBER 2018

KPK GELAR SERANGKAIAN ACARA PERINGATI HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan serangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa dan Rabu, 4-5 Desember 2018.

Hakordia dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan dilanjutkan dengan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK).

Penyelenggaraan KNPK ke-13 mengusung tema “Mewujudkan Sistem

Integritas Partai Politik Indonesia”. Konferensi menghadirkan pembicara Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain itu, hadir pula ketua umum/sekjen dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 yang menandatangani komitmen implementasi sistem integritas di partai politik.

MENUTUP TAHUN 2018, KAMI MENANYAKAN APA PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG KPK. SELAIN JADI ANDALAN UNTUK MEMBERSIHKAN KORUPSI YANG SUDAH BERKERAK DI NEGERI INI, KPK DIHARAPKAN MENGGENCARKAN UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SOSIALISASI TENTANG APA ITU KORUPSI. ADA YANG MENYAMAKAN LEMBAGA INI DENGAN RUMAH JAGAL LHO.

Kinerja KPK sangat baik. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Mereka melakukan apa yang tidak bisa dilakukan polisi, menangkap dengan analisis data. *Power*-nya begitu kuat untuk ngecek berbagai akun bank untuk diperiksa.

Yang jadi salah satu tanggung jawab dan prioritas KPK juga adalah sosialisasi tentang korupsi, budaya korupsi, dan pencegahannya. Mungkin KPK harus kerjasama dengan psikolog, budayawan, atau sosiolog untuk membuat kampanye anti-korupsi.



Dessy Kania,
43 tahun, dosen.

Kehadiran KPK sudah lumayan *sih*, sudah menangkap para koruptor. Tapi menurut saya tetap saja ada yang *gak* bisa ditangkap. Mungkin masih bisa harga damai? Masih ada oknum yang korupsi tapi kebal hukum.

Semoga KPK akan terus memberantas korupsi sesuai dengan namanya dan mengawasi oknum pemerintah yang korup. Dan idealnya memang diteruskan saja *nangkep* koruptor.



Fikri Renaldy,
30 tahun, fotografer.

Sebagai lembaga yang bisa mengatasi kekurangan kinerja aparat selama ini, KPK ya bagus-bagus saja *sih*. Tapi secara pribadi agak *serem* juga karena mereka punya otorisasi bisa sadap pembicaraan sana-sini.

KPK itu lembaga yang bagus buat *nangkep* orang-orang pemerintah yang *gak* *bener*. Ibarat provos kalau di militer. Sogok menyogok tidak akan ada sepanjang pemerintah bisa *fair*. Swasta itu menurut saya lebih profesional ya, sedangkan pemerintah lebih ke aji mumpung.



Ardi Prastyo,
36 tahun, pegawai swasta

Menurut saya, kinerja KPK sudah baik ya, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap, mulai dari yang *cere* sampai yang *parlente*. Tapi kabar yang beredar, masih banyak pejabat dan orang berkuasa yang juga korupsi tapi belum ditindak.

Akan lebih baik jika KPK berani mengusut semua kasus, lebih berani dan tegas dengan orang yang punya kuasa tinggi yang memang bersalah. Semoga KPK bisa membuat jera koruptor dan baiknya membuat kebijakan supaya uang yang disalahgunakan dikembalikan semuanya.



Sintya Winarsih,
26 tahun, content writer

KPK menurut saya adalah badan yang dibuat oleh negara untuk menangkap koruptor. Menghukum *sih* lebih tepatnya, karena KPK yang sibuk kalau ada oknum pemerintah yang melakukan korupsi.

Koruptor perlu untuk dibasmi, apapun jenisnya. Tetapi memang lebih menyebalkan ketika koruptornya orang pemerintahan. Kita sudah bayar pajak buat mereka kerja *bener*, ini malah dikorupsi. Harapan saya KPK harus netral, jangan ada kepentingan-kepentingan terselubung.



Atarrahim Iqbal Putra Riyadi,
28 tahun, pegawai swasta

PENDAPAT PUBLIK

TENTANG KPK

Pemberantas korupsi dan Abraham Samad, itu yang saya ingat dari KPK.

Dibandingkan ketua KPK yang lain, Pak Abraham Samad ini berkesan *aja* *sih*. Orangnya kecil dan pendiam tapi di bawah kepemimpinannya banyak kasus korupsi yang terungkap.

"KPK sudah optimal, tinggal masyarakatnya yang harus dan mau berubah. Karena percuma kalau KPK sendiri yang berusaha mengubah ini-itu sedangkan budaya jelek ini masih tetep jadi budaya. Lembaga seperti polisi dan tentara juga harus mau kerja sama dan terbuka.

Made Yana,
27 tahun, fotografer lepas

Selama ini lebih tahu KPK yang sepak terjangnya di kasus korupsi cukup baik dan menjadi lembaga yang bersih dan jujur. Namun menyayangkan seperti kasus Novel Baswedan kemarin yang seperti tidak dikawal.

Semoga KPK menjadi se-independen mungkin dan dilindungi oleh aparat negara, supaya tidak dianiaya. Karena penting sekali jika bisa sepenuhnya melaksanakan semua yang pada dasarnya jadi maksud didirikannya KPK.

Trisna Wulandari,
24 tahun, pewarta



Rafael Rudi,
46 tahun, pegawai swasta



Danang Wicaksono,
23 tahun, pekerja kreatif.

Dari dulu buat saya KPK itu ibarat *slaughter house* [rumah jagal], karena

kesempatan orang yang masuk situ si calon tersangka, untuk bisa keluar lagi selalu kecil banget bahkan tidak mungkin bisa lolos. Tapi, KPK ini ibarat Batman di Gotham, yang sering tidak didukung sama pejabat-pejabat karena jelas mereka orang yang korup.

Harapan saya KPK lebih meningkatkan info tentang korupsi ke anak muda dari SMP hingga kuliah dengan pendekatan yang disesuaikan dan buat fondasi kuat antara masyarakat dengan KPK.



Dea Sohika,
26 tahun, pekerja lepas.

Tentunya saya senang dan dukung adanya KPK. Karena menurut saya, KPK adalah lembaga independen negara yang fungsinya penting banget, memberantas tindak pidana korupsi.

Sudah banyak pejabat yang kena tangkap tangan sama KPK. Kalau tidak ada KPK, saya tidak yakin *sih* lembaga lain bisa. Sekarang kasus swasta seperti Meikarta juga sudah ditindak. Bagus, karena biasanya pemilik modal dilindungi banget.

Perempuan harus bisa mengatakan tidak pada korupsi dan menjadi agen perubahan, karenanya kaum ibu harus mengetahui celah-celah korupsi.

Basaria Panjaitan,

Wakil Ketua KPK

Kita harus membangun budaya baru yakni budaya antikorupsi, kejujuran, dan integritas terutama di kalangan generasi muda.

Alexander Marwata,

Wakil Ketua KPK

Kepahlawanan versi generasi *now* adalah antikorupsi, apapun profesi dan *passion*-nya, harus penuh integritas dan komitmen melawan korupsi!

Saut Situmorang,

Wakil Ketua KPK

Kita harus terus menanamkan nilai anti korupsi di kalangan pemuda. Kadang kita tidak sabar, tapi tidak bisa didorong-dorong. Yang pasti, kita harus setia dan jangan pernah bosan memerangi ko-

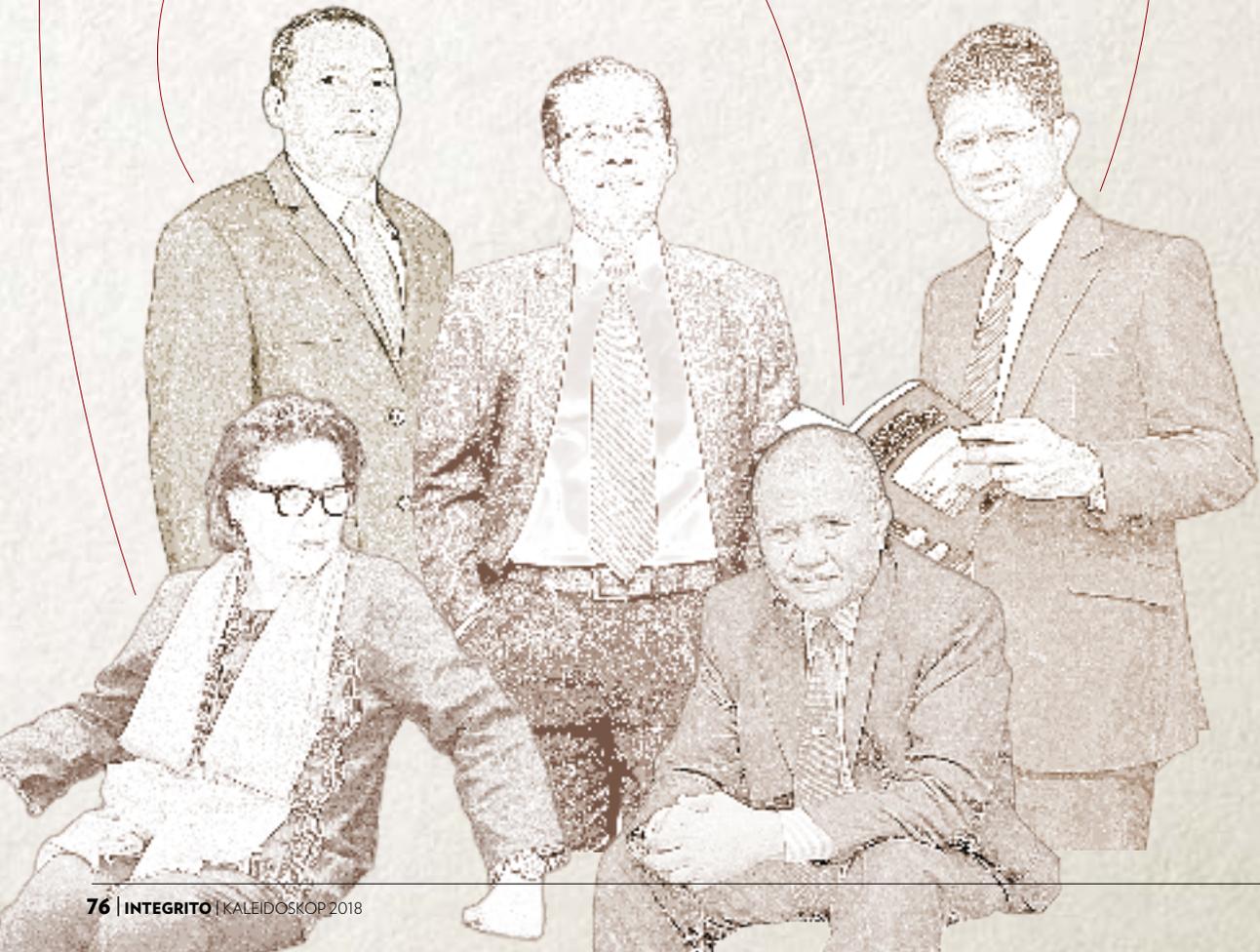
Laode M Syarif,

Wakil Ketua KPK

Generasi Muda harus disadarkan virus korupsi sudah sangat menyebar, KPK tak bisa kerja sendiri, semua harus bergerak!

Agus Rahardjo,

Ketua KPK





198 LAYANAN INFORMASI KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 **Senin - Jumat**
06.00 s.d. 18.00

Lingkup Layanan:
Informasi Gratifikasi,
Informasi LHKPN,
Informasi Publik, dan Informasi
Pengaduan Masyarakat

198 LAYANAN INFORMASI KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

 **Senin - Jumat**
06.00 s.d. 18.00

Lingkup Layanan:
Informasi Gratifikasi, Informasi LHKPN,
Informasi Publik dan Informasi Pengaduan Masyarakat

